

BAB 2

KOMPLEKS KEAMANAN DI SEMENANJUNG KOREA

Bab 2 ini menjelaskan kompleks yang terjadi di kawasan Semenanjung Korea. Tujuan dari bab 2 ini adalah menganalisis mengenai sebab yang dapat menimbulkan kompleks di Semenanjung Korea dan upaya untuk melakukan transformasi dari permusuhan menjadi pertemanan. Hubungan antara kedua negara Korea tersebut akan dibatasi sejak tahun 1953 hingga tahun 2003. Dalam rentang waktu antara 1953-2003 telah tercatat beberapa kejadian-kejadian besar yang mempengaruhi hubungan antara kedua negara (seperti terbaginya kedua negara Korea, Perang Korea dan program nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara) serta keamanan di Semenanjung Korea.

Alur penulisan bab 2 ini diawali dengan penjelasan terbaginya kedua negara Korea menjadi dua negara yang merdeka dan berdaulat di wilayah Utara dan Selatan. Sejak terbaginya kedua negara Korea tersebut, seolah-olah kedua negara tersebut berjalan dalam “takdir” yang berbeda. Tidak adanya norma yang disepakati bersama sebagai rambu dalam hubungan antar negara di Semenanjung Korea, membawa Korea Utara menjalankan dan mengembangkan program nuklir. Program nuklir merupakan faktor yang memperuncing hubungan permusuhan antara Korea Utara dan Korea Selatan.

Tugas dalam melakukan transformasi keamanan di Semenanjung Korea adalah melakukan perbaikan hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Isu program nuklir Korea Utara menambah berat proses transformasi yang dilakukan untuk menjadi lebih bersahabat. Sejak Korea Utara mampu mengembangkan teknologi rudal, maka ancaman senjata nuklir kepada negara lain semakin terbuka lebar. Terutama dengan kejadian krisis nuklir pada tahun 1994 dan terulang kembali pada tahun 2003. Untuk itu di bab 2 ini juga akan dibahas mengenai perubahan kebijakan dari Korea Selatan terhadap Korea Utara untuk membangun hubungan antara kedua negara Korea yang lebih bersahabat sehingga isu program nuklir Korea Utara bisa selesai.

2.1 Terbaginya Negara Korea

Sejarah Korea sebagai sebuah negara diawali dengan berdirinya kerajaan leluhur pada abad ke- 4 sebelum masehi. Pada masa tersebut muncul kerajaan Choson di Korea bagian Utara (dekat perbatasan dengan Cina).¹ Pada tahun 300 Masehi, muncul tiga kerajaan secara terpisah di Semenanjung Korea yang menempati wilayah di Utara, Tenggara dan Barat Daya. Tahun 668 Masehi dibawah kekuasaan kerajaan Silla, tiga kerajaan yang terpisah di Utara, Tenggara dan Barat Daya akhirnya disatukan. Sejak masa tersebut hingga pertengahan abad ke-20, Korea berkembang sebagai sebuah negara kesatuan dibawah satu sistem administrasi serta mengembangkan bahasa sendiri dengan akar tradisi yang kuat.²

Secara geografis, Semenanjung Korea dikelilingi oleh negara-negara besar dan kuat, seperti Cina, Jepang dan Rusia. Sejarah mencatat bahwa sejak jaman kerajaan kuno hingga negara moderen, negara Korea pernah mengalami lima kali masa penjajahan atau penguasaan, seperti oleh Cina, bangsa Mongol, Jepang, Amerika Serikat serta Uni Soviet pasca Perang Dunia kedua. Semenanjung Korea memiliki lokasi yang strategis, sehingga negara-negara besar yang menjadi negara tetangga, menjadikan Semenanjung Korea sebagai sasaran dari perluasan pengaruh serta kepentingan negara-negara besar tersebut.

Semenanjung Korea pun memiliki sejarah kelam terkait dengan kolonialisme. Pada tahun 1905, merupakan tahun dimana Jepang menjajah dan menguasai Korea secara keseluruhan. Latar belakang masuknya Jepang untuk menjajah Korea tidak lepas dari keterlibatan Amerika Serikat dalam “mendukung” proses tersebut. Bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap Jepang dijelaskan sebagai berikut; rakyat Korea menilai bahwa penjajahan yang dilakukan oleh Jepang merupakan hasil dari pengkhianatan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Korea. Pada tahun 1882 disepakati Perjanjian Persahabatan dan Perniagaan (*Treaty of Amity and Commerce*)

¹ Don Oberdorfer, *The Two Koreas A Contemporary History*, (Revised Edition), (United States of America: Basic Books, 2001), hal 3.

² *Ibid*, Don Oberdorfer, hal 3.

antara Korea dan Amerika Serikat.³ Isi dari kesepakatan tersebut adalah janji Amerika Serikat untuk memberikan jasa baik (*good office*) dengan melindungi Semenanjung Korea dari ancaman dan serangan negara luar.⁴

Namun pada tahun 1905 (ketika Jepang menjajah Korea), Amerika Serikat membuat kesepakatan rahasia dengan Jepang. Perjanjian tersebut menyebutkan bahwa Amerika Serikat menyetujui dominasi yang akan dilakukan oleh Jepang terhadap Korea, dengan jaminan bahwa Jepang tidak akan menentang kolonialisme Amerika Serikat di Filipina.⁵ Perjanjian antara Amerika Serikat dan Jepang (pada tahun 1905) melanggar Perjanjian Persahabatan dan Perniagaan sebelumnya antara Amerika Serikat dan Korea (pada tahun 1882). Dengan bermodalkan perjanjian dengan Amerika Serikat, maka pada tahun 1905 Jepang dengan leluasa bisa menguasai dan menjajah di Semenanjung Korea. Pada tahun 1910 Jepang menyatakan daerah jajahannya tersebut sebagai bagian dari milik Jepang. Sejak saat itu penjajahan kejam Jepang atas Korea berlangsung hingga Jepang menyerah pada Agustus 1945.⁶

Pasca berakhirnya penjajahan Jepang, upaya Korea untuk bisa menjadi negara yang bersatu, merdeka dan mandiri tidak bisa diwujudkan. Hambatan untuk bisa mendirikan negara Korea yang bersatu terletak pada intervensi serta persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet di Semenanjung Korea pada masa Perang Dingin. Kronologis keterlibatan secara langsung dua negara adikuasa tersebut di Semenanjung Korea diawali ketika Jepang masih menjajah di Semenanjung Korea (1905-1945), Uni Soviet terlibat peperangan dengan Jepang di Semenanjung Korea.⁷ Pada saat terlibat perang dengan Jepang, Uni Soviet melakukan mobilisasi kekuatan militer dan memasukkan pasukannya di Manchuria dan Korea di bagian Utara. Pengerahan pasukan yang dilakukan oleh Uni Soviet membuat Amerika Serikat sadar

³ Allan R. Millet, Introduction to the Korean War, *The Journal of Military History*, Vol. 65, No. 4, (Oct, 2001),(Society for Military History), hal 928 .

⁴ *Loccit*, Don Oberdorfer, hal 4.

⁵ *Ibid*, hal 5. Perang tersebut berlangsung sejak 1904-1905.

⁶ "North Korea", diambil dari <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2792.htm>, diakses pada 21 April 2009, pukul 00.35 WIB.

⁷ *Opcit*, hal 5.

akan bahaya serta ancaman bahwa upaya yang dilakukan oleh Uni Soviet (dengan memasukkan pasukannya ke Korea bagian Utara) akan berimplikasi dalam bidang militer pada masa depan Jepang dan Asia Timur.⁸ Oleh sebab itu maka Amerika Serikat memberikan perhatian khusus terhadap kejadian tersebut dan melakukan perubahan mengenai kebijakannya di Semenanjung Korea.

Untuk menjaga agar Uni Soviet tidak melakukan perluasan kekuatan militernya ke Selatan, maka pada 10 Agustus 1945, dilakukan pertemuan membahas mengenai tindakan yang harus Amerika Serikat lakukan. Beberapa staf ahli di Gedung Putih yang terlibat dalam rapat tersebut memberikan rekomendasi bahwa Amerika Serikat harus masuk dan menguasai Korea bagian Selatan hingga garis perbatasan 38 derajat yang membagi Semenanjung Korea menjadi Utara dan Selatan.⁹ Rekomendasi tersebut dibuat atas pertimbangan, jika Jepang telah meninggalkan Semenanjung Korea maka dikhawatirkan Uni Soviet akan memperluas pergerakan pasukannya hingga melewati batas 38 derajat menuju Selatan dan menguasai Seoul. Amerika Serikat perlu untuk menjaga agar Uni Soviet tidak memperluas penguasaannya hingga ke bagian Selatan. Dengan penguasaan oleh Uni Soviet di Utara dan Amerika Serikat di Selatan, maka negara Korea terbagi menjadi dua dengan garis perbatasan di titik 38 derajat.

Upaya untuk mendirikan negara Korea pasca penjajahan Jepang, dilakukan melalui Konferensi Yalta yang menunjuk Amerika Serikat, Uni Soviet dan Cina sebagai negara perwalian (*trusteeship*) atas proses kemerdekaan negara Korea.¹⁰ Pada Desember 1945 sebuah konferensi dilaksanakan di Moskow untuk membahas mengenai masa depan Korea.¹¹ Pembahasan mengenai masa depan negara Korea memakan waktu hingga lima tahun tanpa ada kesepakatan diantara anggota negara yang menjadi wali Korea. Pada September 1947, masalah Korea sempat dibawa ke Sidang Majelis Umum PBB,¹² namun tidak ada hasil yang signifikan. Kesulitan untuk

⁸ *Loccit*, Don Oberdorfer, hal 5.

⁹ *Loccit*, Allan R. Millet, hal 930.

¹⁰ *Ibid*, hal 930.

¹¹ *Loccit*, North Korea, <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2792.htm>.

¹² *Ibid*.

mencarikan solusi mengenai kemerdekaan dan bersatunya Korea, terletak pada intervensi kepentingan Amerika Serikat dan Uni Soviet pada saat itu yang ingin memperluas kekuatan dan menyebarkan pengaruh ideologinya di Semenanjung Korea. Sulitnya menciptakan negara Korea yang bersatu dibawah sistem administrasi yang sama, menyebabkan Korea muncul sebagai dua negara yang terpisah. Pada 15 Agustus 1948, Korea bagian Selatan memproklamkan sebagai negara Korea Selatan, dengan Syngman Rhee sebagai Presiden pertama, lalu pada 9 September 1948 Korea Utara memproklamkan sebagai sebuah negara dengan Kim Il Sung sebagai pemimpinnya.¹³

Pengaruh dari Amerika Serikat dan Uni Soviet di Semenanjung Korea, menyebabkan kedua negara tersebut berjalan dalam situasi yang berbeda. Yang menarik adalah bagaimana hubungan antara Korea Utara dan Uni Soviet terjalin. Hubungan antara Uni Soviet dan Korea Utara diibaratkan kurang lebih seperti Walt Disney dan Mickey Mouse.¹⁴ Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa Korea Utara adalah ciptaan atau hasil bentukan dari penyebaran ideologi komunis oleh Uni Soviet. Sosok Kim Il Sung di Korea Utara pun sangat dominan dan kebijakan yang dikeluarkan memberikan pengaruh terhadap kondisi keamanan di kawasan tersebut, terutama ketika Kim Il Sung bertekad untuk menjalankan program nuklir. Program nuklir Korea Utara menjadi faktor yang semakin memperuncing permusuhan di Semenanjung Korea. Untuk menganalisis keterkaitan faktor kepemimpinan dan keamanan di Semenanjung Korea, dijelaskan melalui sub bab berikut ini.

1.2 Faktor Kepemimpinan di Korea Utara

Di Korea bagian Utara, figur Kim Il Sung sangat menonjol karena keberaniannya dalam berjuang melawan penjajahan Jepang. Pengalaman atas penjajahan oleh Jepang dan upaya perjuangan yang dilakukan oleh Kim Il Sung, membuka kesempatan bagi terbentuknya gambaran kepahlawanan yang karismatik

¹³ *Loccit*, Don Oberdorfer, hal 5-10.

¹⁴ John G. Stoessinger, *Why Nations Go To War*, (6th Ed), (New York: St. Martin's Press, Inc, 1993), hal 59.

bagi Kim Il Sung.¹⁵ Gambaran kepahlawanan dan jasa-jasanya untuk memerdekakan Korea dari Jepang, merupakan modal Kim Il Sung yang selalu ditunjukkan kepada rakyat Korea Utara, sehingga rakyat Korea Utara selalu mengucapkan terima kasih atas perjuangan yang dilakukan Kim Il Sung dan akan patuh terhadap perintah dari pemimpin besar negeri tersebut.

Kim Il Sung sangat berambisi untuk menyatukan Korea. Keinginan Kim Il Sung tersebut “direstui” oleh Stalin, setelah Kim Il Sung memaksa untuk diberikan izin menyatukan Korea, sehingga pecah Perang Korea, tahun 1950-1953.¹⁶ Beberapa argumen yang muncul dalam menganalisis Perang Korea, keinginan Kim Il Sung untuk menyatukan Korea didorong pula oleh kepentingan Uni Soviet untuk melebarkan pengaruhnya ke kawasan Asia. Setelah Uni Soviet berhasil menguasai Cekoslovakia (pada tahun 1948), dan di Eropa Barat muncul Pakta Militer Atlantik Utara atau NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) sehingga menyulitkan perluasan ke Eropa Barat, maka Uni Soviet mengalihkan perluasan pengaruhnya ke Asia.¹⁷ Perluasan pengaruh komunisme ke Semenanjung Korea juga merupakan upaya dari Joseph Stalin untuk menjaga agar kemajuan yang pesat dari komunisme di Cina (di bawah Mao Tse Tung) tidak akan memberikan kesulitan bagi Uni Soviet nantinya.¹⁸

Ketika Perang Korea pecah, Amerika Serikat ikut terlibat dan membantu Korea Selatan. Terutama ketika mengetahui bahwa Korea Utara di dukung oleh Uni Soviet. Dukungan Amerika Serikat terhadap Korea Selatan diberikan melalui perintah dari Presiden Harry Truman (atas rekomendasi Menteri Luar Negeri Dean Acheson) kepada Jendral MacArthur untuk memberikan dukungan serta melengkapi persenjataan militer Korea Selatan.¹⁹ Presiden Truman juga memerintahkan agar angkatan laut dan udara Amerika Serikat memberikan bantuan semaksimal mungkin

¹⁵ Han S. Park, North Korean Perceptions of Self and Others: Implications for Policy Choices, *Pacific Affairs*, Vol. 73, No. 4, Special Issue: Korea in Flux (Winter, 2000-2001), hal 504.

¹⁶ Joseph S. Nye, Jr, *Understanding International Conflict; an Introduction to Theory and History* (2nd ed), (United States of America: Longman, 1997), hal 108.

¹⁷ *Loccit*, John G. Stoessinger, hal 53.

¹⁸ *Ibid*, hal 53.

¹⁹ *Ibid*, hal 60.

untuk mendukung pasukan Korea Selatan di garis perbatasan 38 derajat. Bantuan Amerika Serikat yang lain adalah dengan membawa permasalahan perang ini kepada sidang Dewan Keamanan PBB. Presiden Truman berhasil meyakinkan DK PBB dan mengeluarkan resolusi (tanpa kehadiran dari Uni Soviet) untuk memberikan bantuan militer ke Korea Selatan.²⁰

Perang Korea 1950-1953 hanya diselesaikan melalui perjanjian gencatan senjata. Akibatnya menyisakan permasalahan yaitu tidak adanya kesepakatan damai sehingga permusuhan antara Korea Utara dan Korea Selatan belum tuntas. Permusuhan diantara Korea Utara dan Korea Selatan mempengaruhi persepsi masing-masing negara yang melihat tetangganya sebagai musuh dan ancaman. Bagi Korea Utara, Korea Selatan adalah ancaman terutama dengan kehadiran kekuatan militer Amerika Serikat untuk melindungi Korea Selatan. Bagi Korea Selatan, pengalaman invasi yang dilakukan pada waktu perang Korea, menunjukkan bahwa agresifitas Korea Utara untuk menyatukan Korea merupakan ancaman yang sewaktu-waktu bisa bangkit kembali. Dengan situasi hubungan yang demikian mengakibatkan tidak adanya norma yang disepakati antara kedua negara Korea untuk mengatur hubungan keduanya.

Dalam kondisi anarki, setiap negara dipaksa untuk bisa bertahan dan berupaya untuk mencapai tujuan nasionalnya. Salah satu unsur dalam membangun sebuah negara selain faktor diplomasi dan sumber ekonomi, kekuatan militer (*military power*) juga termasuk kedalamnya. Untuk mempertahankan keberadaan sebuah negara, kekuatan militer dipandang sebagai prasyarat bagi kelangsungan sebuah negara.²¹ Pengembangan kekuatan militer bisa dilakukan dengan memperkuat kekuatan secara konvensional, seperti menambah jumlah pasukan atau menambah pesawat tempur, kapal selam dan lain sebagainya. Namun seiring dengan perkembangan dinamika persenjataan, kemudian ditemukan senjata dengan

²⁰ *Loccit*, Joseph Nye Jr, hal 108. Uni Soviet tidak hadir dalam pengambilan keputusan resolusi tersebut. Terdapat 32 negara yang tergabung dalam pasukan PBB, seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, Afrika Selatan, Selandia Baru, Perancis, Kolombia, Etiopia, Yunani, Thailand, Belgia, Turki, Inggris, Philipina, Luksemburg dan Belanda.

²¹ John Garnett, *The Role of Military Power*, dalam Richard Little, *Perspective on World Politics* (2nd edition), (New York : Routledge, 1991), hal 71.

menggunakan teknologi nuklir. Bagi sebuah negara memiliki beberapa alasan untuk mengembangkan kemampuan nuklirnya;²²

- Militer
 - Keinginan untuk mencapai keunggulan militer terhadap musuh atau negara yang mungkin secara potensial akan menjadi musuhnya.
 - Untuk membangun suatu kekuatan penangkal, baik terhadap kekuatan lawan yang telah memiliki kekuatan nuklir terlebih dahulu.
 - Keinginan untuk lebih mandiri sehingga tidak terlalu menggantungkan diri kepada negara sekutunya.
 - Keinginan untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi militer, sehingga tidak terlalu tergantung pada negara-negara besar dan membuka kemungkinan untuk memiliki kekuatan nuklir sendiri.
- Diplomatik dan harga diri,
 - Kemampuan militer yang dimiliki oleh sebuah negara akan mempengaruhi kekuatan serta posisi tawar sebuah negara dalam melakukan diplomasi dengan negara lain.
 - Dengan kemampuan nuklir yang dimiliki akan menambah wibawa negara tersebut baik di tingkat kawasan maupun internasional.
 - Kemampuan sebuah negara untuk mengembangkan teknologi nuklirnya digunakan sebagai isyarat terhadap lawan bahwa jika diinginkan maka teknologi nuklir tersebut bisa dialihkan menjadi program persenjataan nuklir.

Bagi Korea Utara, melaksanakan program nuklir merupakan tujuan utama bagi negara tersebut untuk bisa bertahan dalam anarkisme di Semenanjung Korea. Terutama jika memperhatikan bahwa hasil sampingan dari penggunaan uranium untuk mengaktifkan reaktor nuklir, bisa menghasilkan plutonium yang kemudian bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku senjata nuklir. Sejak tahun 1950 Korea Utara sudah mulai merancang untuk melakukan program nuklir. Program nuklir Korea Utara

²² A.R. Sutopo, Proliferasi Nuklir dan Permasalahannya, dalam Analisa CSIS, Masalah Strategi Nuklir, Tahun XV. No 2, Feb 1986, (Jakarta : CSIS, 1986), hal 151.

dipengaruhi dan didominasi oleh pemikiran dari Kim Il Sung. Ambisi Kim Il Sung terhadap nuklir disebabkan oleh;²³

Pertama, Kim Il Sung sangat terkesan dengan kekuatan dari pengeboman yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Jepang (di Hiroshima dan Nagasaki). Kim Il Sung sangat terkesan karena keperkasaan Jepang seketika runtuh ketika dijatuhkan dua bom atom tersebut. Bagi Kim Il Sung kejadian tersebut sangat berkesan karena ketika melepaskan diri dari penjajahan Jepang, Kim Il Sung harus bergerilya selama lima belas tahun. Kim Il Sung berpendapat dan percaya kepada efek dari penggunaan bom atom sehingga ia berpendapat bahwa pada suatu saat kemampuan senjata nuklir dapat mengalahkan musuh dengan cepat.

Kedua, ketika terjadinya perang Korea, Amerika Serikat dibawah Presiden Truman sempat mempertimbangkan akan menggunakan senjata nuklir untuk mematahkan dan meredam agresifitas tentara-tentara Korea Utara.²⁴ Hal tersebut terungkap ketika dokumen perang Korea dibuka kepada publik pada akhir 1950-an. Isi dokumen tersebut membuat Kim Il Sung kaget dan membayangkan ketakutan jika pada masa depan Korea Utara akan dijadikan sasaran dari senjata nuklir Amerika Serikat.

Korea Utara sangat merasa terancam dan takut dengan kemampuan militer Amerika Serikat. Terutama ketika kekuatan persenjataan dan nuklir taktis Amerika Serikat hadir untuk melindungi Korea Selatan, membuat Korea Utara semakin terpojok.²⁵ Pilihan Korea Utara untuk menghadapi ancaman tersebut adalah dengan mengandalkan penggunaan senjata nuklir. Dalam perspektif Korea Utara, kemampuan nuklir Korea Utara bisa menjadi penyeimbang bagi kemampuan persenjataan Korea Selatan yang berkerjasama dengan Amerika Serikat. Dengan hadirnya kekuatan militer Amerika Serikat untuk melindungi Korea Selatan, kekhawatiran dari Korea Utara adalah jika kekuatan tersebut dipakai untuk menyerang ke Korea Utara. Sehingga nuklir Korea Utara juga berfungsi sebagai

²³ *Loccit*, Mansourov, hal 46-47.

²⁴ *Ibid*, hal 46.

²⁵ Andrew Mack, *The Nuclear Crisis on the Korean Peninsula*, *Asian Survey*, Vol. 33, No. 4 (Apr 1993), (United States: University of California Press, 1993), hal 342.

penggentaran (*deterrent*) terhadap kehadiran kekuatan Amerika Serikat di Semenanjung Korea.²⁶

Ketiga, Korea Utara tidak bisa selamanya mengandalkan hubungan yang baik dengan negara-negara sekutunya terutama Uni Soviet. Kim Il Sung mengambil pelajaran ketika terjadi krisis nuklir di Kuba pada Oktober 1962. Ketika upaya penyelesaian terhadap permasalahan tersebut dilakukan, Kim Il Sung menilai bahwa Uni Soviet bertindak hanya atas pertimbangan kepentingan nasionalnya sendiri tanpa memikirkan posisi Kuba sebagai negara sekutunya. Perlu diperhatikan bahwa Korea Utara merupakan salah satu negara sekutu Uni Soviet. Namun dengan terjadinya Krisis Kuba tersebut, Kim Il Sung mempertimbangkan bahwa hubungan baik dengan Uni Soviet tidak bisa diandalkan untuk kelangsungan masa depan Korea Utara.

Hubungan antara Korea Utara dengan Uni Soviet pun mengalami kemunduran. Uni Soviet lebih tertarik untuk membina hubungan yang lebih baik dengan Korea Selatan yang jauh lebih maju dan dinamis perekonomiannya, dibandingkan dengan terus mendukung rejim Korea Utara yang bangkrut dan bengal.²⁷ Pada tahun 1990 ketika Uni Soviet mengumumkan akan mengakui Korea Selatan, Menteri Luar Negeri Korea Utara mengeluarkan memorandum yang menyatakan bahwa; “jika hubungan diplomatik (Uni Soviet-Korea Selatan) dilaksanakan, maka hubungan antara Korea Utara dengan Uni Soviet akan mengalami kebuntuan dan bagi Korea Utara tidak ada pilihan selain mengusahakan untuk memiliki persenjataan bagi diri sendiri, dimana selama ini masalah persenjataan kami percayakan kepada pihak sekutu.”²⁸ Pernyataan tersebut bisa diartikan bahwa Korea Utara berniat untuk mengembangkan persenjataan nuklir.

Keempat, Korea Utara mendengar pada akhir 1970-an, Korea Selatan sedang melakukan program pengembangan senjata nuklir secara sembunyi-sembunyi.²⁹ Walaupun pada kelanjutannya pemerintah Amerika Serikat memaksa pemerintahan

²⁶ *Loccit*, Andrew Mack, hal 342.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Loccit*, Mansourov, hal 47.

Korea Selatan³⁰ untuk menghentikan program tersebut. Sebagai gantinya pemerintah Amerika Serikat memperkenalkan senjata nuklir taktis yang akan di tempatkan di bagian Selatan Semenanjung Korea dengan tujuan untuk melindungi Korea Selatan.³¹ Selain itu Amerika Serikat dan Korea Selatan menyepakati untuk melaksanakan latihan militer “*Team Spirit*” bersama (dimulai sejak tahun 1977) setiap tahun.³²

Korea Utara menilai baik program senjata nuklir dan latihan militer “*Team Spirit*”, keduanya ditujukan untuk menghadapi Korea Utara. Kim Il Sung merasa yakin bahwa program senjata nuklir Korea Selatan akan ditujukan kepada rejim pemerintahannya. Sedangkan latihan militer yang dilakukan setiap tahun menandakan persiapan tentara Korea Selatan dan Amerika Serikat untuk menghadapi Korea Utara jika pecah perang diantara kedua negara Korea. Secara resmi program pengembangan senjata nuklir Korea Utara dilakukan pada akhir tahun 1970an, ketika Kim Il Sung memberikan perintah kepada Kementrian Industri Energi Atom (*Ministry of Atomic Energy Industry*) dan Tentara Rakyat Korea (*Korean People’s Army*) untuk meluncurkan program pengembangan senjata nuklir (*Joint Nuclear Weapons Development Program*).³³

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa ambisi nuklir Kim Il Sung disebabkan oleh keinginannya untuk menjadikan Korea Utara menjadi negara mandiri, terutama dalam bidang persenjataan. Kim Il Sung menilai bahwa dengan memiliki senjata nuklir maka Korea Utara tidak perlu lagi bergantung kepada negara lain dalam melindungi keamanan nasionalnya. Selain itu, dengan nantinya senjata nuklir yang dimiliki, Kim Il Sung mengharapkan bahwa posisi tawar Korea Utara terhadap negara-negara lain, terutama negara besar, bisa sejajar dan diperhitungkan. Kemandirian Korea Utara dilandasi juga oleh ideologi nasional Korea Utara, yaitu ideologi *juche* yang juga merupakan hasil pemikiran Kim Il Sung yang menjadi akar ideologi nasional Korea Utara. Untuk memberikan gambaran mengenai kronologis

³⁰ Pada saat itu Presiden Korea Selatan yang berkuasa adalah Park Chong-hee.

³¹ *Loccit*, Mansourov, hal 47.

³² *Ibid.*

³³ Sharif Shuja, *The DPRK’s Nuclear Program and Policy; Continuities, Changes and Challenges*, *Korea Observer*, Vol.XXVIII, No. 4, Winter 1997, (Korea: Institute of Korean Studies), hal 672.

program nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara, akan dijelaskan dalam sub bab berikutnya.

1.3 Program Nuklir Korea Utara

Keseriusan Kim Il Sung untuk terhadap ambisi nuklirnya, diwujudkan dengan mulai menjalankan program nuklir Korea Utara. Aktifitas program nuklir Korea Utara dapat dibagi kedalam empat fase; pertama, fase permulaan (tahun 1950-an), kedua fase *indigenous accumulation of knowledge and technical expertise* (awal tahun 1960-an sampai pertengahan tahun 1970-an), ketiga fase *rapid expansion* (akhir tahun 1970-an sampai tahun 1990-an) dan keempat fase *design switch/maturation* (tahun 1994).³⁴

Pada fase pertama (dalam kurun waktu 1950-1960), Korea Utara memulai program nuklirnya dengan melakukan kerjasama pelatihan dan pengiriman peneliti ke negara-negara seperti Uni Soviet dan Cina.³⁵ Pada tahun 1950, antara pemerintah Korea Utara dengan Uni Soviet ditandatangani perjanjian dalam hal penelitian nuklir dan melakukan transfer reaktor nuklir ke Pyongyang.³⁶ Melalui perjanjian kerjasama tersebut maka Korea Utara mengirimkan penelitiannya untuk mendapatkan pelatihan secara profesional di kompleks penelitian nuklir milik Uni Soviet yaitu *Dubna Nuclear research Complex*. Selama tahun 1960-1970, secara total jumlah peneliti yang telah dilatih di *Dubna Nuclear Research Complex* telah mencapai 2.400 peneliti spesialis yang kemudian akan di pekerjakan di fasilitas nuklir Yongbyon.

Pada fase kedua (awal 1960- pertengahan 1970-an), program nuklir Korea Utara memasuki fase *indigenous accumulation of knowledge and technical expertise*. Fase kedua ini merupakan kelanjutan dari fase pertama setelah Korea Utara mengirimkan para penelitiannya untuk dilatih di Uni Soviet dan Cina. Dalam fase ini ditandai dengan dimulainya pembangunan fasilitas-fasilitas penelitian nuklir untuk mengembangkan program nuklir Korea Utara ketahap yang lebih lanjut. Fase kedua dimulai ketika para peneliti generasi pertama yang telah menjalani pelatihan di Uni Soviet dan Cina kembali ke Korea Utara pada awal 1960. Pemerintah Korea Utara

³⁴ *Loccit*, Shuja, hal 672.

³⁵ *ibid*.

³⁶ *Loccit*, Mansourov, hal 42.

kemudian memutuskan untuk menyediakan reaktor bagi para peneliti tersebut dengan membangun kompleks penelitian nuklir di daerah Yongbyon, di Timur Laut Pyongyang.³⁷ Keputusan Korea Utara untuk membangun kompleks penelitian nuklir di daerah Yongbyong disebabkan oleh dua hal; rejim Kim Il Sung berpendapat bahwa pemilihan lokasi di Yongbyon akan mempersulit deteksi yang dilakukan oleh negara musuh Korea Utara dan pemilihan lokasi tersebut karena dimungkinkan untuk membangun instalasi bawah tanah.³⁸ Selain itu proses pengontrolan terhadap lokasi dapat dilakukan dengan mudah karena lokasi tersebut jauh dari pemukiman penduduk dan daerah industri.

Didalam kompleks penelitian Yongbyon, terdapat beberapa reaktor yang berfungsi untuk mendukung berjalannya kompleks tersebut. Reaktor pertama adalah reaktor penelitian yang didatangkan dari Uni Soviet pada bulan Agustus 1965 dengan kapasitas awal sebesar 2-4 MWT (Megawatt), yang kemudian di kembangkan oleh para peneliti Korea Utara menjadi 8 MWT. Reaktor nuklir yang kedua berkapasitas 5 MWT yang dioperasikan sejak tahun 1986. Reaktor ketiga adalah reaktor berkapasitas 50 MWT yang selesai di bangun pada tahun 1996.³⁹

Perlu diperhatikan bahwa pada fase pengembangan kedua ini, Korea Utara juga melakukan pengembangan rudal balistik. Pengembangan rudal balistik diawali ketika pada tahun 1960, Kim Il Sung mendirikan *Hamhung Military Academy* untuk mendukung pengembangan senjata moderen Korea Utara. Akademi tersebut kemudian menjadi basis bagi pengembangan infrastruktur rudal Korea Utara, dimana personel Korea Utara mulai menerima latihan untuk pengembangan rudal. Secara umum, pada tahun 1960an merupakan masa diawalinya pengembangan roket *surface to air missiles* (SAM) dan *anti-ship missiles* dan permulaan dari pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung program rudal Korea Utara.⁴⁰

³⁷ *Loccit*, Mansourov, hal 42.

³⁸ *Loccit*, Sharif Shuja, hal 672.

³⁹ Tai Sung An, The Rise and Decline of North Korea's Nuclear Weapons Program, *Korea and World Affairs*, Vol.16, No, 4, Winter 1992, (Korea: research Center for Peace and Unification of Korea), hal 677-678.

⁴⁰ *Missile Overview*, diambil dari http://www.nti.org/e_research/profiles/NK.index_1667.html, diakses 10 Maret 2009, Pukul 17.43 WIB.

Pengembangan rudal balistik Korea Utara diawali dengan kerjasama antara Korea Utara dan Uni Soviet dimana Uni Soviet akan membantu Korea Utara dalam melakukan modernisasi kemampuan militernya. Sesuai dengan kesepakatan, pada awal tahun 1963, Uni Soviet mengirimkan sistem *surfce to air missile* (SAM) dengan tipe V-75 Dvina (SA-2) ke Korea Utara.⁴¹ Pada tahun 1968 Korea Utara menerima sekitar 27-63 buah FROG-5 (*Free Rocket Over Ground*), lalu TEL (*transport ejector launcher*) dan perlengkapan terkait dari Uni Soviet.⁴²

Fase ketiga (akhir 1970 – awal 1990) merupakan fase dimana Korea Utara melakukan ekspansi dalam pengembangan program nuklirnya. Fase ini dimulai ketika Kim Il Sung memimpin *Korean People's Army* (KPA) dan *Ministry of Atomic Energy Industri* (MAEI) untuk memulai mengimplementasikan desain program nuklir Korea Utara, termasuk melakukan ekspansi besar-besaran fasilitas nuklir dan pembangunan infrastruktur program senjata nuklir di Yongbyon.⁴³ Dalam fase ini Korea Utara mulai melakukan pengembangan teknologi bahan bakar nuklir, mendesain senjata nuklir dan mengembangkan sistem pengiriman senjata nuklir.

Pengembangan rudal Korea Utara dilakukan juga dengan kerjasama dengan negara lain. Pada tahun 1980, Korea Utara dan Mesir menandatangani perjanjian kerjasama dan pertukaran teknologi rudal.⁴⁴ Dalam kerjasama ini diantara Korea Utara dan Mesir juga melakukan pertukaran informasi teknis, dokumentasi dan personel. Pada tahun yang sama Korea Utara juga memperoleh sejumlah rudal Scud-B dari Mesir dan melakukan modifikasi terhadap rudal tersebut. Mesir juga mengirimkan sejumlah rudal R-17E, MA 2-543 TEL, serta kendaraan dan perlengkapan pendukungnya.⁴⁵ Dengan rudal R-17E, Korea Utara mulai melakukan program modifikasi yang menghasilkan rudal Hwasong-5.⁴⁶ Selama tahun 1982-

⁴¹ Frank Barnaby and Nick Ritchie, *North Korea; Problems, Perception and Proposal*, (Oxford: Oxford Research Group, 2004), hal 23.

⁴² *Ibid*, Frank Barnaby, hal 23.

⁴³ *Loccit*, Mansourov, hal 42.

⁴⁴ *Opcit*, Frank Barnaby and Nick Ritchie, hal 23.

⁴⁵ Michael D. Swaine dan Loren H. Ranyon, *Ballistic Missile Defence in Asia*, dalam *NBR Analysis*, Vol. 13, No.3, June 2002, (Washington: The National bureau of Asian Research, 2002), hal 27.

⁴⁶ *Loccit*, Barnaby, et.al, hal 23.

1983, Korea Utara terus mengembangkan rudal Hwasong-5 dan pada awal tahun 1984 baru diselesaikan bentuk dasar pertama dari rudal Hwasong-5.⁴⁷

Pada bulan April dan September 1984, Korea Utara melaksanakan program uji coba peluncuran bentuk dasar (*prototype*) Hwasong-5 di tempat uji coba Musudan-ri, daerah pantai Timur laut Korea Utara. Hwasong-5 memiliki kemampuan untuk menyerang target dua pertiga dari wilayah Korea Selatan.⁴⁸ Antara tahun 1985 – 1987, Korea Utara memulai produksi secara rutin rudal Hwasong-5 di *Man'gyongdae Electric Machinery Factory* dan dicatat bahwa Korea Utara mampu memproduksi sekitar 8-12 misil perbulan selama tahun 1987-1988.⁴⁹

Hwasong-5 merupakan rudal balistik pertama yang berhasil di produksi oleh Korea Utara. Namun rudal Hwasong-5 memiliki kelemahan dalam daya jangkauan dan kapabilitas yang cukup. Keterbatasan rudal Hwasong-5 kemudian membuat Korea Utara mengembangkan rudal Hwasong-6 yang memiliki kemampuan jelajah lebih jauh sekitar 600 km.⁵⁰ Rudal Hwasong-6 diproduksi di pabrik *San'um-dong Research and Development Center*. Tahun 1989, Korea Utara sudah mulai melakukan produksi Hwasong-6 dalam skala kecil dan pada tahun 1991 Korea Utara dicatat telah berhasil memproduksi rudal tersebut dengan jumlah sekitar 4-8 unit setiap bulannya.⁵¹ Kemampuan jelajah rudal Hwasong-6 mampu menjangkau semua kota di Korea Selatan dan pangkalan militer Amerika Serikat di Korea Selatan.⁵²

Pada tahun 1988, Korea Utara mulai mengembangkan rudal Rodong-1.⁵³ Rudal Rodong-1 merupakan rudal jarak menengah *Medium Range Ballistic Missile* (MRBM) yang dikembangkan dari rudal scud. Tahun 1989-1990 prototipe dari rudal

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Hwasong-5, diambil dari http://www.nti.org/e_research/profiles/NK/Missile/1367.html, diakses 10 Maret 2009, pukul 17.46 WIB.

⁵⁰ Center for Nonproliferation Studies Monterey Institute of International Studies (CNS MIIS), *CNS Special report on North Korean Ballistic Missile Capabilities*, March 22, 2006, hal 2. diambil dari <http://cns.miis.edu>, diakses 10 Maret 2009, pukul 13.49 WIB.

⁵¹ Bruce Bennet, The Emergency Ballistic Missile Threat: Global and Regional Remifications, dalam Natalie W. Vracoford and Chung-In Moon (ed), *Emerging Threats, Force Structure and The Role of Air Power in Korea*, (Washington D.C. :RAND, 2000), hal 187.

⁵² *Loc cit*, *CNS Special report on North Korean Ballistic Missile Capabilities*, hal 3.

⁵³ Nodong-1, diambil dari http://www.nti.org/e_research/profiles/NK/Missile/1363.htm, diakses 10 Maret 2009, pukul 10.21 WIB

Rodong-1 diproduksi oleh *San'um-dong Research and Development Center*. Terdapat tiga tujuan bagi Korea Utara untuk mengembangkan rudal Rodong;⁵⁴

- Adanya keinginan untuk memproduksi rudal balistik yang mampu mengangkut hulu ledak dengan berat 1000-1500 kg dan memiliki daya jelajah mencapai 1000-1500 km (dalam hal ini dimaksudkan untuk bisa menjangkau Jepang, termasuk pangkalan militer Amerika Serikat di Okinawa).
- Proyek pengembangan rudal Rodong merupakan proyek yang dijadikan dasar bagi pengembangan sistem rudal dan teknologi terkait yang dapat menjadi inti atau tahapan pertama bagi perkembangan rudal balistik selanjutnya dengan jarak jangkauan yang lebih baik.
- Rudal Rodong dimaksudkan sebagai rudal balistik yang mampu mengangkut senjata nuklir.

Korea Utara mulai melakukan uji coba rudal Rodong antara tahun 1990-1993. Pada tanggal 25 Mei 1993, Korea Utara meluncurkan empat rudal (tiga rudal Hwasong dan satu rudal Rodong) yang merupakan uji coba rudal balistik terbesar di Korea Utara.⁵⁵ Keempat rudal tersebut diarahkan kepada target yang mengapung di di laut Timur dan segaris dengan Semenanjung Noto, Jepang. Pada akhir bulan April 1994, badan intelejen Amerika Serikat kembali mendeteksi aktifitas persiapan di fasilitas peluncuran Musudan-ri dan melihat adanya peningkatan aktifitas yang dipercaya sebagai rangkaian uji coba Rodong.⁵⁶ Pada tahun 1993, Korea Utara telah berhasil memproduksi rudal Rodong dengan jumlah sekitar 18 rudal.⁵⁷ Tahun 2001 terdapat beberapa laporan yang menyebutkan bahwa Korea Utara telah memproduksi sekitar 40-100 rudal.⁵⁸

Selain mengembangkan rudal rodong, sejak awal 1990-an Korea Utara juga telah mengembangkan sistem rudal balistik yang disebut dengan Taepodong-1 dan

⁵⁴ Barbara Starr, Nodongs May Be Soon Be Nuclear, Warns US, *Jane's Defense Weekly*, 18 Juni 1994, hal 23.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Nodong-1, diambil dari http://www.nti.org/e_research/profiles/NK/Missile/1363.htm, diakses 9 Maret 2009, pukul 8.21 WIB

⁵⁸ *Loccit*, Nodong-1.

Taepodong-2. Rudal Taepodong-1 terdiri dari dua tahapan pengembangan, dimana pada tahap pertama menggunakan sistem dari Rodong dan pada tahap kedua menggunakan Hwasong-6. Taepodong-2 menggunakan pengembangan tiga tahap, dimana sistem rudal Rodong pada tahap pertama, lalu Hwasong-6 pada tahap kedua dan sistem pendorong (*booster*) pada tahap ketiga.⁵⁹ Taepodong-1 memiliki kemampuan untuk menjangkau objek vital di Jepang sedangkan Taepodong-2 memiliki kemampuan hingga menjangkau Alaska, Hawaii dan bagian Barat dari Amerika Serikat. Berdasarkan laporan dari Intelejen Amerika Serikat bahwa kemungkinan rudal-rudal tersebut bisa dipasang dengan senjata biologi atau kimia.⁶⁰ Pada bulan Mei, 1990, Korea Utara melakukan uji coba rudal Taepodong-2 di tempat percobaan Musudan-ri.⁶¹



⁵⁹ Nodong-2, diambil dari http://www.nti.org/e_research/profiles/NK/Missile/1342.htm, diakses 9 Maret 2009, pukul 9.01 WIB

⁶⁰ *Loccit, CNS Special report on North Korean Ballistic Missile Capabilities*, hal 2-3.

⁶¹ *Opcit, Nodong-2*.

Berikut ini adalah tabel kemampuan rudal yang dimiliki oleh Korea Utara;⁶²

Tabel 1. Kemampuan Rudal Korea Utara

	Jarak Jangkauan (km)	Kemampuan Hulu Ledak (kg)	Hulu Ledak	CEP* (meter)	Pelontar/ Bahan Bakar	Sasaran	Status
Hwasong-5	300	987-989	Konvensional; Kemungkinan nuklir, biologi atau kimia	800-1,000	Dapat berpindah, bahan bakar cair	Korea Selatan	Dikembangkan dan diekspor
Hwasong-6	500	770	Konvensional; Kemungkinan nuklir, biologi atau kimia	2,000	Dapat berpindah, bahan bakar cair	Korea Selatan	Dikembangkan dan diekspor
Rodong	1,000	700	Konvensional; Kemungkinan nuklir, biologi atau kimia	2,000-4,000	Dapat berpindah, bahan bakar cair	Jepang	Dikembangkan dan diekspor
Taepodong - 1	2,200	700-1,000	Konvensional; Kemungkinan nuklir, biologi atau kimia	Tidak diketahui	Diam ditempat, bahan bakar cair	Jepang, Okinawa	Uji Coba
Taepodong-2	5,000-6,000	1,000	Konvensional, kemungkinan nuklir, biologi atau kimia	Tidak diketahui	Diam di tempat, bahan bakar cair	Amerika Serikat	Pengembangan, uji coba bentuk dasar

⁶² *Loc cit*, CNS Report tahun 2006, hal 10.

*CEP atau *Circular Error Probable*, adalah tingkat ketidakakuratan antara target yang dituju oleh rudal dengan tempat mendaratnya rudal.

Pada fase keempat (sejak tahun 1994) terjadi perubahan dari program nuklir yang selama ini dijalankan oleh Korea Utara. Program nuklir yang dikembangkan sejak tahun 1950-an dan program rudal sejak tahun 1960-an mengalami pembekuan. Pembekuan dilakukan sebagai akibat dari akumulasi kejadian-kejadian yang menyertainya. Penyebab dibekukannya program nuklir Korea Utara dikarenakan terjadinya krisis nuklir pada tahun 1994. Sebagai penyelesaian dari krisis tersebut, disepakati kerangka kesepahaman (*Agreed Framework*) antara Korea Utara dan Amerika Serikat. Isi dari kesepakatan tersebut adalah bantuan yang diberikan kepada Korea Utara sebagai kompensasi jika Korea Utara mau menghentikan program nuklirnya. Korea Utara menyetujui isi dari kesepakatan tersebut dan sejak tahun akhir 1994 Korea Utara mulai menghentikan program nuklirnya.

Tahun 1994 juga merupakan tahun yang bersejarah bagi proses transformasi keamanan di Semenanjung Korea. Terutama dengan dibekukannya program nuklir Korea Utara, menjadikan untuk sementara kawasan Semenanjung Korea menjadi lebih kondusif. Perhatian khusus terhadap penyelesaian krisis pada tahun 1994 adalah dengan mengupayakan pendekatan dialog. Upaya pendekatan dialog menjadi salah satu penanda bahwa transformasi dari permusuhan menjadi persahabatan bisa dilakukan. Salah satu penganjal dari proses transformasi yang dilakukan adalah bahaya akan ancaman nuklir Korea Utara. Dengan dihentikannya program nuklir tersebut, memberikan hasil dengan dibangunnya proses komunikasi antar negara Korea dan negara lain. Untuk menjelaskan mengenai kronologis krisis yang terjadi dan upaya penyelesaiannya, dijelaskan melalui sub bab di bawah sebagai berikut;

2.4 Krisis Nuklir Tahun 1994

Tahun 1994 diwarnai dengan terjadinya krisis nuklir di Semenanjung Korea. Kronologis timbulnya krisis tersebut hingga proses penyelesaiannya sebagai berikut; Pada tahun 1985, Korea Utara menandatangani perjanjian *Non-Proliferation Treaty* (NPT)⁶³. Alasan dibalik Korea Utara mau menandatangani NPT dikarenakan tekanan Uni Soviet. Pada pertengahan 1980-an, Pyongyang meminta bantuan Uni Soviet untuk membangun program teknologi nuklir. Uni Soviet sendiri khawatir terhadap Korea Utara jika mampu menjalankan program nuklirnya. Kekhawatiran Uni Soviet adalah sifat dari rejim Korea Utara yang tidak dapat diprediksi dan jarak antara kedua negara tidak jauh. Uni Soviet meminta kepada Korea Utara untuk menyetujui NPT dengan harapan melalui keterlibatan Korea Utara dalam perjanjian

⁶³ *Loccit*, Barnaby, et.al., hal 24.

internasional, maka pengawasan program nuklir Korea Utara menjadi tanggung jawab dan perhatian dunia internasional.⁶⁴

Walaupun pada tahun 1985 Korea Utara telah menandatangani perjanjian NPT, namun baru pada 7 Januari 1992 Korea Utara meratifikasi perjanjian NPT dan Korea Utara sepakat untuk menandatangani *nuclear safeguard measures agreement* dengan IAEA (*International Atomic and Energy Agency*) pada bulan April 1992.⁶⁵ Berdasarkan perjanjian yang telah ditandatangani oleh Korea Utara dengan IAEA, dijelaskan bahwa IAEA berhak untuk melakukan inspeksi kepada negara yang telah menandatangani perjanjian tersebut untuk membuktikan dan mencari fakta bahwa negara yang menjalankan program nuklir tidak melakukan pengembangan senjata nuklir.

Sebagai kelanjutan atas ratifikasi Korea Utara terhadap NPT, maka pada bulan Mei 1992, tim inspeksi internasional pertama melakukan inspeksi di kompleks nuklir Yongbyon. Direktur Jendral IAEA, Hans Blix pada tanggal 10 Juni 1992 melaporkan bahwa berdasarkan inspeksi yang dilakukan tanggal 25 Mei-6 Juni 1992, konstruksi yang dimiliki fasilitas nuklir Korea Utara telah mencapai 80 persen tahap penyelesaian. Hans Blix melihat bahwa walaupun fasilitas nuklir yang dimiliki oleh Korea Utara hampir sampai tahap penyelesaian, namun ia mengatakan bahwa semua fasilitas yang dimiliki oleh Korea Utara sudah ketinggalan jaman dan fasilitas-fasilitas tersebut masih dalam kondisi belum dalam pengoperasian.⁶⁶ Dengan hasil tersebut dinyatakan bahwa teknologi nuklir Korea Utara masih jauh untuk bisa memproduksi secara massal plutonium.⁶⁷

Hasil inspeksi oleh IAEA dipandang oleh Korea Selatan tidak begitu memuaskan. Ketidakpuasan ini dipicu oleh dua fasilitas yang masih ditutupi oleh Korea Utara dari proses inspeksi yang dilakukan IAEA sebelumnya. Korea Selatan merasa tidak puas terhadap inspeksi yang dilakukan oleh IAEA terhadap Korea Utara.⁶⁸ Korea Selatan meminta kepada IAEA untuk melakukan “inspeksi spesial” terhadap dua fasilitas yang masih dirahasiakan oleh Korea Utara di kompleks penelitian Yongbyon.⁶⁹ Korea Utara menolak permintaan tersebut. Karena Pyongyang memegang hasil inspeksi sebelumnya dan menyatakan bahwa inspeksi yang

⁶⁴ *Loccit*, Andrew Mack, hal 346.

⁶⁵ *Loccit*, Mansourov, hal 44.

⁶⁶ *Loccit*, Tai Sung An, hal 678-679.

⁶⁷ *Ibid*.

⁶⁸ *Loccit*, Don Oberdorfer, hal 279-280

⁶⁹ *Loccit*, Sharif Shuja, hal 675.

telah dilakukan oleh IAEA merupakan bentuk kerjasama Korea Utara sehingga hasilnya patut di hargai.

Pada 25 Februari 1993, Dewan Gubernur IAEA mengeluarkan ultimatum kepada Korea Utara untuk menyetujui dilakukannya inspeksi pada tanggal 25 Maret atau akan “menghadapi langkah berikutnya”.⁷⁰ Yang dimaksud dengan “langkah berikutnya” adalah membawa permasalahan Korea Utara ke Dewan Keamanan PBB (DK PBB), dimana Korea Utara bisa dijatuhi hukuman berupa sanksi embargo ekonomi. Inspeksi spesial yang diinginkan Korea Selatan dan IAEA ditolak oleh Pyongyang. Korea Utara berpendapat bahwa hasil inspeksi dari IAEA sebelumnya merupakan sebuah kebenaran dan dua fasilitas yang dimaksud oleh Korea Selatan merupakan fasilitas militer bukan nuklir.⁷¹ Korea Utara memperingatkan sekaligus mengancam bahwa segala macam upaya untuk memaksakan dilaksanakannya inspeksi akan membawa Semenanjung Korea kepada bencana peperangan.⁷² Silang pendapat antara IAEA, Korea Utara dan Korea Selatan menimbulkan kekecewaan dan kemarahan dari Korea Utara.

Kemarahan Korea Utara dipicu juga dengan tetap dilangsungkannya latihan militer antara Amerika Serikat dengan Korea Selatan yang diumumkan pada Januari 1993.⁷³ Pada 9 Maret, merupakan hari pertama dilakukannya latihan militer bersama (*Team Spirit*) antara Amerika Serikat dan Korea Selatan. Latihan *Team Spirit* melibatkan 70.000 pasuka Korea Selatan dan 50.000 pasukan Amerika Serikat, ditambah dengan 19.000 pasukan Amerika Serikat yang didatangkan dari luar Semenanjung Korea dan latihan tersebut didukung dengan pengiriman kapal induk USS Independence yang merapat dipantai Korea Selatan.⁷⁴

Pada bulan Maret 1993, secara tiba-tiba Korea Utara memutuskan untuk menarik diri dari perjanjian NPT dengan alasan sebagai bentuk “tindakan membela diri” (*self-defensive measure*) untuk melindungi kepentingan Korea Utara.⁷⁵ Menanggapi latihan militer Amerika Serikat dan Korea Selatan yang berlangsung sejak 9 Maret 1993, Kim Il Sung menyiapkan pasukan militernya dalam status setengah siaga perang.⁷⁶ Kim Il Sung selalu merasa khawatir atas latihan

⁷⁰ *Loccit*, Andrew Mack, hal 339.

⁷¹ *Opcit*, Sharif Shuja, hal 675.

⁷² *Opcit*, Andrew Mack, hal 339.

⁷³ James Strohmaier and Joe Philips, *The World vs Kim Jong Il: The Legal Case Against a Nuclear-Armed North Korea*, *Pacific Focus, Inha Journal of International Studies*, Vol XX, No. 2, Fall 2005, (Korea: Center for International Studies, Inha University Korea, 2005), hal 201.

⁷⁴ *Loccit*, Don Oberdorfer, hal 279.

⁷⁵ *Loccit*, Mansourov, hal 44.

⁷⁶ *Loccit*, James, et.al, hal 201.

militer yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat. Kim Il Sung menilai bahwa latihan tersebut sebagai persiapan perang menghadapi Korea Utara.⁷⁷ sehingga Korea Utara mensiagakan pasukannya untuk berjaga-jaga. Penolakan Korea Utara terhadap inspeksi yang dilakukan oleh IAEA dan penarikan diri Korea Utara dari perjanjian NPT membuat isu nuklir di Semenanjung Korea memanas dan berujung kepada pecahnya krisis nuklir di Semenanjung Korea pada tahun 1994.

Pertengahan 1994, keamanan di Semenanjung Korea berada dalam sebuah kondisi yang tidak menentu. Sebagian analis menilai kondisi tersebut sebagai sebuah krisis. Krisis di Semenanjung Korea mengacu kepada dua hal; *Pertama*, adalah sikap Korea Utara yang menarik diri dari perjanjian internasional (NPT). Dengan bergabungnya Korea Utara dalam NPT diharapkan kegiatan program nuklir Korea Utara bisa diawasi dan dipantau. Penarikan diri Korea Utara dari perjanjian tersebut mengakibatkan tidak ada pihak yang mampu dan diijinkan untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh Korea Utara. Ketiadaan pengawasan inilah yang membuat kondisi keamanan menjadi tidak menentu, apakah Korea Utara akan bertindak dengan rasional atau tidak dengan program nuklirnya.

Kedua, adalah pasukan Korea Utara dalam kondisi siaga. Alasan untuk menyiagakan pasukan adalah sebagai bentuk protes terhadap latihan militer Amerika Serikat-Korea Selatan. Penempatan pasukan dalam kondisi siaga membuat kondisi krisis menjadi semakin panas. Di bagian Utara, Pyongyang menyiapkan pasukan, sedangkan dibagian Selatan pasukan Amerika Serikat dan Korea Selatan sedang berlatih dan bisa disiagakan untuk menghadapi Korea Utara. Potensi untuk kembali terjadi perang antara Korea Utara dan Korea Selatan terbuka lebar, mengingat perang Korea hanya diselesaikan dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.

1.4 Penyelesaian Krisis Nuklir 1994

Walaupun potensi terjadinya peperangan terbuka lebar, namun pihak-pihak yang bertikai masih bisa menahan diri. Jika peperangan kembali meletus di Semenanjung Korea, maka dampaknya akan mengakibatkan rusaknya keamanan sistem di kawasan Asia Timur secara luas. Krisis nuklir di Semenanjung Korea ditenggarai oleh sikap Korea Utara. Sikap nekat Korea Utara akan berimplikasi negatif jika tidak dihadapi dengan menggunakan pendekatan yang bisa diterima oleh rejim di Pyongyang. Untuk menyelesaikan krisis tersebut maka perlu dilakukan

⁷⁷ *Opcit*, Don Oberdorfer, hal 279.

pendekatan terhadap rejim Korea Utara. Pendekatan dilakukan agar proses penyelesaian krisis bisa berjalan dengan damai.

Perlu diketahui bahwa ketika krisis di Semenanjung Korea menjadi perhatian dunia internasional, kondisi domestik Korea Utara sedang mengalami tantangan dan permasalahan. *Pertama*, tantangan tersebut adalah proses pergantian kepemimpinan di Korea Utara. Pada 9 Juli 1994 diumumkan secara resmi kematian Kim Il Sung, pemimpin besar Korea Utara.⁷⁸ Korea Utara merupakan sebuah negara dimana proses pergantian presiden dilakukan dengan cara memilih anak dari presiden sebelumnya. Proses suksesi kekuasaan lebih bersifat kekeluargaan, terutama untuk posisi-posisi penting dan strategis biasanya akan ditempati oleh kerabat atau bahkan anak dari presiden Korea Utara. Ini yang membuat Korea Utara diberi julukan sebagai “negara keluarga” (*familiy state*).⁷⁹ Dengan kondisi demikian maka calon pemimpin Korea Utara selanjutnya jatuh kepada putra Kim Il Sung yang tertua, yaitu Kim Jong Il.

Jika dibandingkan dengan Kim Il Sung sebagai seorang pemimpin, maka kemampuan kepemimpinan Kim Jong Il masih dipertanyakan. Kim Il Sung merupakan seorang pejuang geriliya, bapak pendiri negara dan seorang pemimpin yang karismatik. Sedangkan Kim Jong Il hidup dengan segala kemewahan yang didapat sebagai putra pemimpin besar Korea Utara. Kim Jong Il tidak pernah berkarir di dunia militer sampai akhirnya Kim Jong Il menduduki posisi Komandan Pasukan Rakyat (*People’s Army*) pada Desember 1991.⁸⁰ Namun untuk menjaga keberlanjutan rejim maka proses suksesi dilaksanakan dengan baik untuk menaikkan Kim Jong Il sebagai presiden Korea Utara selanjutnya dengan julukan *Dear Leader*.

Kedua, selain tantangan untuk melakukan suksesi dengan lancar, maka permasalahan domestik lain yang dihadapi oleh rejim Korea Utara adalah kondisi perekonomian Korea Utara yang berada dalam kondisi buruk. Korea Utara merupakan negara komunis yang mengalokasikan dan menghabiskan banyak uang negara dalam pengembangan dan peningkatan kekuatan militer, terutama sejak dilakukannya program nuklir Korea Utara. Pelaksanaan program peningkatan kekuatan militer akan memakan banyak biaya, sumber daya industri dan kemampuan manusia yang besar.⁸¹ Kebijakan Korea Utara untuk mengembangkan kemampuan nuklir memberikan

⁷⁸ *Loccit*, Don Oberdorfer, hal 341. Secara medis Kim Il Sung meninggal pada tanggal 7 Juli 1994, ketika sedang melakukan kunjungan ke pegunungan Myonghyang. Namun secara resmi baru diumumkan kematiannya pada 9 Juli 1994.

⁷⁹ *Ibid*, hal 347.

⁸⁰ *Loccit*, Don Oberdorfer, hal 346.

⁸¹ *Loccit*, John Garnett, hal 70.

dampak yang negatif bagi ketahanan ekonomi Korea Utara. Pada tahun 1994, dilaporkan bahwa Korea Utara mengalokasikan 22 persen dari GNP untuk keperluan pertahanan.⁸²

Alokasi yang besar pada bidang pertahanan tidak sejalan dengan ketahanan dari kondisi perekonomian, terutama sejak krisis yang mulai melanda Korea Utara tahun 1990-an. Pada tahun 1990-an perekonomian Korea Utara mengalami kemerosotan dan diprediksi hal tersebut sulit untuk diatasi.⁸³ Bukti kemerosotan perekonomian Korea Utara ditunjukkan dengan hasil penelitian (sejak tahun 1990-1993) yang memperlihatkan bahwa kondisi perekonomian Korea Utara mengalami penurunan, bahkan minus dari 3 persen sampai hampir 9 persen, seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini;

Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi Korea Utara (1990-1993)

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
1990	-3,7 %
1991	-5,2 %
1992	-7,6 %
1993	-8,5 %

Sumber; Hakjoo Kim, North Korea's Nuclear Development Program and Future, *Korea and World Affairs*, Vol.18, No.2, Summer 1994, (Korea: Research Center for Peace and Unification of Korea, 1992), hal 125.

Menurunnya pertumbuhan ekonomi Korea Utara setiap tahun dikarenakan roda perekonomian Korea Utara tidak berjalan dengan baik. Perdagangan internasional Korea Utara dengan negara-negara komunis mengalami kemerosotan. Terutama dikarenakan pada pasca Perang Dingin, banyak negara komunis yang terpecah maupun sudah meninggalkan ideologi komunis. Kondisi tersebut menyebabkan sulitnya Korea Utara melakukan perdagangan internasional. Selain itu, didalam negeri Korea Utara juga mengalami permasalahan berupa kelangkaan sumber daya energi (berupa bahan bakar dan listrik). Kondisi tersebut diperparah dengan kelangkaan pangan yang disebabkan oleh buruknya cuaca dan kelangkaan pupuk yang melanda Korea Utara. Kerentanan didalam negeri disebabkan oleh banyaknya rakyat Korea Utara yang harus menjadi korban kelaparan akibat buruknya pertanian di negara tersebut.

⁸² Hakjoo Kim, North Korea's Nuclear Development Program and Future, *Korea and World Affairs*, Vol.18, No.2, Summer 1994, (Korea: Research Center for Peace and Unification of Korea, 1992), hal 285.

⁸³ *Ibid*, hal 287. Bukti dari kemerosotan perekonomian Korea Utara ditunjukkan melalui hasil penelitian oleh para ahli ekonomi yang menganalisis ekonomi Korea Utara. Kim Hakjoo menulis hasil penelitian ini didasarkan kepada; *North Korean News*, 25 Oktober, 1 November, 8 November, 15 November, 20 Desember 1993 dan Barry Gill, North Korea and the Crisis of Socialism, *Third World Quarterly*, Vol 13, No. 1 (1991), hal 125.

Korea Utara menjalankan kebijakan pertahanan keamanan berdasarkan ideologi *Juche*, dimana dituntut kemandirian negara dalam hal kemampuan militer. Tujuan untuk menjadi negara yang mandiri secara militer dilakukan dengan mengalokasikan anggaran pertahanan yang lebih besar disaat perekonomian Korea Utara tidak berada di kondisi yang baik. Kemandirian dalam bidang militer tidak seimbang dengan kemampuan dalam bidang ekonomi. Sehingga kemajuan di bidang militer tidak memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat Korea Utara. Langkanya bahan bakar dan listrik serta kelangkaan pangan, menunjukkan bahwa Korea Utara memiliki masalah yang sangat berpotensi melemahkan rejim otoriter Korea Utara. Ketakutan dari para elit politik di Korea Utara adalah jika musuh-musuh Korea Utara mengharapkan keruntuhan Korea Utara yang disebabkan oleh lemahnya kondisi domestik.⁸⁴

Rejim Korea Utara menghadapi permasalahan dari sisi domestik dan internasional. Secara domestik, walaupun tidak muncul upaya menggulingan atau protes terhadap ketidakberesan rejim Korea Utara menjalankan roda perekonomian oleh rakyatnya, namun kekhawatiran muncul justru kepada reaksi negara-negara luar yang menginginkan runtuhnya rejim di Korea Utara. Lemahnya perekonomian Korea Utara ditambah kelangkaan sumber daya energi ditakutkan oleh rejim di Pyongyang sebagai pemicu keruntuhan awal dari rejim yang berkuasa sejak tahun 1950-an. Dari sisi internasional, tindakan pengunduran diri sepihak yang dilakukan oleh Korea Utara dari NPT sebagai pemicu krisis menyebabkan perhatian dunia internasional tertuju kepada sikap selanjutnya dari Korea Utara, apakah Korea Utara akan membawa krisis nuklir tersebut menjadi semakin berlarut-larut dan bertindak tidak rasional atau menyelesaikan krisis tersebut dengan cara damai. Rejim Korea Utara menghadapi dilema apakah akan bersifat lebih bersahabat dalam menghadapi krisis nuklir di Semenanjung Korea atau semakin bersifat arogan dengan resiko ancaman keterpurukan ekonomi yang semakin dalam dan keruntuhan rejim.

Pilihan untuk meredakan krisis nuklir di Semenanjung Korea akhirnya jatuh dengan memberikan bantuan bagi Korea Utara. Sebenarnya bisa saja rejim di Pyongyang dibiarkan runtuh dengan sendirinya, mengingat kondisi domestik Korea Utara yang menderita. Namun muncul kekhawatiran jika memang benar rejim di Korea Utara runtuh, maka bisa berakibat kepada melubernya arus pengungsian dari Korea Utara ke negara-negara sekitar. Selain itu, jika rejim di Pyongyang menjadi lumpuh maka ketakutan selanjutnya adalah mengenai nuklir dan

⁸⁴ *Loccit*, Hakjoon Kim, hal 286.

rudal yang dimiliki oleh Korea Utara. Akan sulit mengontrol hal tersebut jika rejim yang selama ini menjadi pengatur dan penjaga dari semua program yang dilaksanakan mengalami keruntuhan di kemudian hari.

Keterpurukan ekonomi dan kekhawairan merosotnya kemampuan rejim di Pyongyang membuat Korea Utara membutuhkan bantuan dari negara lain sebagai jalan keluar.⁸⁵ Isu bantuan asing bagi Korea Utara menurunkan tensi ketegangan dari krisis nuklir dan juga membawa angin segar bagi jalan keluar krisis ekonomi di Korea Utara. Bantuan ekonomi dan bantuan kebutuhan bahan bakar, memberikan kesempatan bagi rejim di Korea Utara untuk menyelamatkan krisis ekonomi di dalam negeri. Untuk mempertahankan rejim di Pyongyang, Korea Utara mau bersikap bersahabat dan terbuka dalam menyelesaikan krisis nuklir dengan imbalan bantuan dari negara asing. Upaya memberikan bantuan kepada Korea Utara adalah langkah untuk membuat Pyongyang bisa lebih bersahabat dalam mencari penyelesaian krisis nuklir di Semenanjung Korea. Dunia internasional memberikan kompensasi bantuan dengan jumlah yang besar kepada Korea Utara dengan konsekuensi bahwa Korea Utara mau menjamin tidak akan melanjutkan lagi program nuklirnya.⁸⁶

Upaya penyelesaian krisis nuklir pada tahun 1994 dilaksanakan melalui dialog langsung antara Korea Utara melalui Kim Il Sung dengan Amerika Serikat melalui Jimmy Carter. Dialog yang dilakukan di Jenewa tersebut, menghasilkan kesepakatan kerangka kesepahaman (*agreed framework*) yang ditandatangani pada 21 Oktober 1994 di Jenewa.⁸⁷ Isi dari *agreed framework* tersebut adalah sebagai berikut;⁸⁸

- Amerika Serikat akan membentuk sebuah konsorsium internasional untuk menyediakan reaktor-air ringan bagi Korea Utara, dengan total kemampuan sebesar 2000 megawatt dan target diselesaikannya pembangunan reaktor tersebut adalah pada tahun 2003. Sebagai balasan atas pembangunan reaktor tersebut adalah Korea Utara akan membekukan semua aktifitas yang berkaitan dengan program nuklir dan reaktor-reaktor terkait. Untuk membuktikan keseriusan Korea Utara maka Korea Utara mengizinkan IAEA untuk melakukan inspeksi dan pengawasan atas konsistensi Korea Utara.

⁸⁵ *Loccit*, Andrew Mack, hal 349.

⁸⁶ *Ibid*, hal 349.

⁸⁷ Scoot Snyder, *The Korean Peninsula Energy Development Organisation; Implications for Northeast Asian Regional Security Co-operation*, *North Pacific Policy Papers*, Institute of Asian Research, University of British Columbia, 2000, hal 2.

⁸⁸ *Loccit*, Don Oberdorfer, hal 357.

- Korea Utara dengan segala kerelaan akan mematuhi inspeksi yang dilakukan oleh IAEA- termasuk melakukan inspeksi spesial yang pernah ditolak-. Korea Utara akan membongkar secara total reaktor-reaktor nuklir yang dimiliki ketika target pembangunan reaktor-air ringan sudah selesai dibangun.
- Amerika Serikat akan mengatur pengiriman dan penyediaan 500.000 ton minyak mentah untuk dikirimkan ke Korea Utara setiap tahunnya untuk kepentingan energi, selama proses pembangunan reaktor-air ringan belum selesai dibangun.
- Kedua negara (Amerika Serikat-Korea Utara) akan menurunkan hambatan-hambatan perdagangan dan investasi. Kedua negara akan membuka kantor diplomatik penghubung sebagai langkah awal sebelum normalisasi hubungan kedua negara.
- Korea Utara akan melaksanakan kesepakatan tahun 1991 mengenai *North-South Joint Declaration on the Demilitarization of Korean Peninsula* dan melakukan dialog kembali dengan Korea Selatan.

Untuk menjaga komitmen kedua belah pihak terhadap kerangka kesepakatan yang telah di tandatangani, maka didirikan KEDO (*Korean Peninsula Energy Development Organization*), pada tanggal 9 Maret 1995 yang beranggotakan Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat. Terdapat tiga tujuan utama dari pembentukan KEDO;⁸⁹

- Berdirinya KEDO untuk memberikan kontribusi yang dapat memperkuat rejim non-proliferasi internasional. Selain itu KEDO juga bertujuan untuk memajukan prospek keamanan dan stabilitas di Semenanjung Korea.
- KEDO berfungsi sebagai pengawas dari implementasi kerangka kesepakatan (*agreed framework*) dimana Korea Utara telah menyepakati untuk membekukan dan membongkar program nuklir yang telah dijalankan. KEDO bertugas untuk merancang dan mengawasi proses pembangunan dua reaktor-air ringan yang akan dibangun di Korea Utara.
- KEDO merupakan sebuah contoh bagaimana kerjasama internasional melalui pendekatan diplomatik bisa digunakan sebagai jalan keluar dari kondisi krisis keamanan maupun sebuah krisis politik.

KEDO merupakan bentuk kerjasama internasional untuk menjaga kerangka kesepakatan agar Korea Utara memenuhi janji untuk meninggalkan program nuklirnya. Upaya penyelesaian

⁸⁹ *Loccit*, Scoot Snyder, *North Pacific Policy Paper.*, hal 5.

krisis nuklir ikut melibatkan dan membutuhkan kerjasama dari negara-negara di luar kawasan Semenanjung Korea, seperti Jepang, Amerika Serikat dan Rusia.

2.4 Kebijakan Korea Selatan Terhadap Korea Utara

Program nuklir Korea Utara merupakan ancaman nyata bagi keamanan Korea Selatan. Kebijakan keamanan nasional Korea Selatan sangat dipengaruhi oleh program nuklir Korea Utara. Dalam menilai respon yang diberikan oleh Korea Selatan terhadap Korea Utara dapat dikategorikan kedalam dua kategori;⁹⁰

- Pertama adalah kategori yang menilai tindakan Korea Selatan sebagai tindakan yang keras. Tindakan ini dikategorikan sebagai tindakan yang keras, karena Korea Selatan melihat bahwa nuklir Korea Utara merupakan ancaman yang sangat berbahaya dan potensial. Sehingga respon yang diberikan terhadap Korea Utara juga dilakukan dengan tindakan yang tegas. Maka tindakan yang perlu dilakukan adalah membawa permasalahan tersebut kepada Dewan Keamanan PBB dan memberikan sanksi militer terhadap Korea Utara.
- Kedua adalah tindakan yang dikategorikan sebagai sikap yang halus (*dove*). Tindakan ini menunjukkan sikap dari Korea Selatan yang mau untuk melakukan negosiasi dan dialog dengan Korea Utara. pendekatan yang bersahabat dilakukan karena untuk menghadapi rejim Pyongyang maka pendekatan dialog akan lebih berguna dan permasalahan nuklir Korea Utara dapat diselesaikan jika menggunakan pendekatan diplomasi.

Sejak tahun 1990-an, Korea Selatan mulai melakukan kebijakan yang bersahabat terhadap Korea Utara. Pendekatan dialog dilakukan karena melihat sejak tahun 1953, hubungan antara kedua negara Korea tidak berjalan dengan baik hingga pola hubungan antar negara Korea cenderung saling bermusuhan. Tujuan pendekatan dialog adalah untuk merubah kondisi keamanan di Semenanjung Korea. Pendekatan dialog yang dilakukan oleh Korea Selatan merupakan langkah awal dari proses transformasi keamanan dari sebelumnya saling bermusuhan menjadi persahabatan diantara kedua negara Korea.

Pendekatan dialog merupakan cetak biru yang dilaksanakan secara estafet oleh setiap presiden Korea Selatan yang menjabat. Untuk menjelaskan upaya pendekatan Korea Selatan

⁹⁰ Young Jeh Kim, North Korea's Nuclear Program and Its Impact on Neighboring Countries, dalam *Korea and World Affairs*, Vol 17, No.3, Fall 1993, hal 479.

yang dilakukan secara berkesinambungan, berikut ini akan dijelaskan mengenai kebijakan yang dilaksanakan oleh presiden Korea Selatan, sejak tahun 1989 – 2003.

2.4.1 Kebijakan *Northern Policy* Presiden Roh Tae-Woo (1989-1993)

Pada masa kepemimpinan Presiden Roh Tae Woo, Korea Selatan sedang mengalami kemajuan dalam hal perekonomian berupa peningkatan perdagangan internasional dan dalam hubungan antar negara ditingkat internasional posisi Korea Selatan menjadi perhatian dunia dengan diselenggarakannya Olimpiade di Seoul tahun 1988.⁹¹ Dengan segala kemajuan yang diperoleh oleh Korea Selatan khusus mengenai isu hubungan kedua negara Korea, sejak era kepemimpinan presiden Roh Tae Woo, pendekatan diantara keduanya dilakukan melalui proses dialog.

Untuk memuluskan jalan dialog dengan Korea Utara, maka Presiden Roh Tae Woo membuka hubungan diplomatik dengan negara-negara sekutu Korea Utara, yaitu Cina (1992) dan Russia (1990).⁹² Tujuan dari pembukaan hubungan diplomatik ini adalah agar negara-negara kunci tersebut bisa dilibatkan dan memberikan dukungan positif bagi proses dialog diantara negara Korea dengan tujuan akhir yaitu transformasi keamanan di Semenanjung Korea. Dengan dukungan dari negara sekutu Korea Utara, maka diharapkan sikap kedua negara tersebut mampu mempengaruhi sikap dan proses pengambilan kebijakan dari rejim di Pyongyang. Namun disayangkan bahwa pembukaan hubungan diplomatik Korea Selatan dengan negara sekutu Korea Utara, dianggap sebagai sebuah “pengkhianatan persekutuan” oleh Pyongyang. Ketika Cina dan Rusia membuka hubungan diplomatik dengan Korea Selatan, Korea Utara merasa ditinggalkan karena tidak ada lagi negara yang berada dibelakangnya untuk mendukung kebijakan yang dikeluarkan dari Korea Utara, terutama terkait program nuklir yang dilakukan.

Kebijakan ke-Utara (*Northern Policy*) yang dijalankan pada masa Presiden Roh Tae Woo memiliki sasaran yaitu untuk meredakan situasi ketegangan diantara kedua negara Korea. Ketiadaan kesepakatan perdamaian pasca berakhirnya perang Korea, memberikan celah bagi terulangnya kembali konflik bersenjata diantara kedua negara. Pada tahun 1988, Presiden Roh Tae Woo mengusulkan kepada Korea Utara untuk meningkatkan perdagangan dan kontak pada

⁹¹ Chalmers Johnson, South Korean Democratization: The Role of Economic Development, *The Pacific Review*, Vol.2, no. 1, 1989, hal 8.

⁹² Dan C. Sandford, ROK's nordpolitik: Revisited, *The Journal of East Asian Affairs*, vol. 7, no.1 (Winter/Spring 1993), hal 1-4.

tingkat individu diantara kedua negara Korea.⁹³ Korea Selatan mengajukan sebuah konferensi puncak dengan Kim Il Sung dan sebuah deklarasi yang berisi tentang kesepakatan non agresif atau pelarangan penggunaan kekuatan bersenjata diantara kedua negara Korea. Presiden Roh Tae Woo juga mengusulkan untuk dibentuk sebuah konferensi dengan melibatkan dua negara Korea plus empat negara kunci (Amerika Serikat, Russia, Cina dan Jepang) sebagai wahana konsultasi untuk mempromsikan keamanan di Semenanjung Korea.⁹⁴

Semangat kerjasama diantara kedua negara Korea berakumulasi kepada kesepakatan untuk menjadikan Semenanjung Korea kawasan bebas senjata nuklir. Presiden Roh Tae Woo pernah menyatakan bahwa;

*“Korea Selatan hanya akan menggunakan nuklir semata-mata sebagai sumber energi dan hanya untuk tujuan damai. Korea Selatan tidak akan memproduksi, menyimpan, mengembangkan dan menggunakan senjata nuklir”.*⁹⁵

Pembicaraan yang melibatkan kedua negara Korea pada masa Presiden Roh Tae Woo menghasilkan sebuah kesepakatan *Initiative for Denuclearization and Peace on the Korean Peninsula* pada 18 November 1991.⁹⁶ Dengan didasarkan kepada kesepakatan tersebut maka pada tahap selanjutnya disepakati tentang *North-South Joint Declaration on the Denuclearization of the Korean Peninsula* pada 31 Desember 1991.⁹⁷ Melalui deklarasi ini, kedua negara Korea setuju untuk melakukan pelarangan penggunaan senjata nuklir di Semenanjung Korea. Beberapa kesepakatan yang dicapai oleh kedua negara Korea tersebut antara lain;⁹⁸

- Korea Utara dan Korea Selatan tidak diperbolehkan untuk melakukan uji coba, memproduksi, menerima, menyimpan, mengirim atau menggunakan senjata nuklir.
- Korea Utara dan Korea Selatan hanya akan menggunakan energi nuklirnya untuk tujuan yang damai.
- Korea Selatan dan Korea Utara tidak akan membangun fasilitas pemroses nuklir atau fasilitas untuk produksi uranium.
- Dalam rangka pencapaian kawasan Semenanjung Korea yang bebas nuklir, Korea Utara dan Korea Selatan akan saling mengadakan inspeksi terhadap objek-objek yang disetujui.

⁹³ *Loccit*, Dan C. Sandford, hal 4.

⁹⁴ *Loccit*, Young Jeh Kim, hal 482.

⁹⁵ *Loccit*, Chalmers Johnson, hal 10.

⁹⁶ Soo-hang Lee, *Seoul's Unification Approach and Perspective on Peace and Security*, dalam Amos A. Jordan (ed), *Korean Unification: Implication's For Northeast Asia*, (Washington: CSIS), hal 21.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

Dan inspeksi tersebut dilakukan berdasarkan prosedur yang ditentukan oleh Komisi bersama *South-North Joint Nuclear Control Commission*.

Sikap bersahabat diantara kedua negara Korea membawa energi positif bagi transformasi keamanan di Semenanjung Korea. Melalui komunikasi yang terjalin secara intensif membuahkan hasil dengan mulai terbangunnya sikap saling mempercayai diantara kedua belah pihak. Sikap saling bersahabat diantara kedua negara Korea diperkuat dengan ditiadakannya latihan militer tahunan “*team spirit*” antara Korea Selatan dan Amerika Serikat pada tahun 1992.⁹⁹ Karena selama ini Korea Utara sangat khawatir dengan latihan militer yang dilakukan oleh Korea Selatan-Amerika Serikat. Terutama latihan militer dengan mengerahkan jumlah pasukan yang besar, menimbulkan ketakutan bahwa latihan tersebut bisa dimanfaatkan sebagai strategi pengepungan dan upaya persiapan untuk menyerang Korea Utara. Respon positif Korea Utara ditunjukkan dengan meratifikasi NPT dan menandatangani *safeguard agreement* pada Mei 1992. Korea Utara pun mau membuka diri dan mempersilahkan tim dari IAEA untuk melakukan inspeksi terhadap fasilitas nuklir Korea Utara.

2.4.2 Kebijakan Presiden Kim Yong Sam (1993-1998)

Era kepemimpinan Kim Yong Sam merupakan masa dimana banyak kejadian bersejarah berlangsung di Semenanjung Korea. *Pertama*, dalam masa kepemimpinan Kim Yong Sam, rejim Korea Utara mengalami pergantian pemimpin kekuasaan. Kim Il Sung meninggal tahun 1994 dan digantikan oleh Kim Jong Il. *Kedua*, terjadi krisis nuklir di Semenanjung Korea. *Ketiga*, krisis nuklir di Semenanjung Korea diselesaikan melalui mekanisme dialog dengan disepakati *agreed framework* antara Korea Utara dan Amerika Serikat. Melalui kesepakatan tersebut juga Korea Utara mau untuk meninggalkan program nuklirnya dan sebagai kompensasi maka akan diberikan bantuan berupa pembangkit listrik bertenaga air dan pengiriman minyak mentah sebagai bahan bakar energi.

Perlu dicatat bahwa pada masa kepemimpinan presiden Kim Yong Sam, peran Korea Selatan dalam melakukan transformasi keamanan di Semenanjung Korea, tidak terlalu dominan. Seperti contoh ketika penyelesaian krisis tahun 1994, upaya penyelesaian tersebut dilakukan antara Korea Utara dan Amerika Serikat secara langsung. Kontak langsung diantara Pyongyang dan Washington, seolah-olah “mengesampingkan” Korea Selatan dalam mencari solusi krisis

⁹⁹ *Loccit*, Mel Gurtov, hal 10.

tahun 1994.¹⁰⁰ Walaupun tidak terlalu dominan, namun bukan berarti tidak ada kontribusi yang diberikan pada masa presiden Kim Yong Sam. Posisi Korea Selatan yang tidak terlalu dominan pada masa Kim Yong Sam disebabkan oleh keenganan Kim Jong Il melakukan kontak langsung dengan Kim Yong Sam.

Dibandingkan dengan ketika Kim Il Sung masih hidup dan berkuasa, kontak antara Korea Utara dan Korea Selatan masih berjalan baik. Pada masa Kim Il Sung, Kim Yong Sam memberikan bantuan 500.000 ton beras untuk membantu rakyat Korea Utara. Jumlah tersebut lebih banyak lima kali lipat dari jumlah bantuan yang diminta oleh Pyongyang melalui para pebisnis Korea Selatan.¹⁰¹ Pada masa Kim Yong Sam proses unifikasi antara kedua negara Korea dikonsepsikan melalui suatu bentuk konfederasi. Melalui sistem konfederasi tersebut, negara Korea tidak bergabung menjadi satu tetapi masih menjalankan dua sistem yang terpisah. Proses unifikasi pun dilakukan dengan melakukan rekonsiliasi terlebih dahulu, yaitu dengan memperbanyak kunjungan diantara keluarga yang terpisah dan surat menyurat.¹⁰²

Pergantian rejim di Korea Utara memberikan implikasi terhadap hubungan kedua negara Korea. Kim Yong-Sam mencoba untuk mengeksploitasi kematian Kim Il Sung serta proses suksesi kepemimpinan dengan tujuan agar rejim di Korea Utara menjadi lemah. Kim Yong-Sam berharap bahwa dengan lemahnya rejim di Korea Utara akan membuka kesempatan bagi masuknya Korea Selatan secara perlahan sehingga pada akhirnya mampu menguasai Korea Utara.¹⁰³ Proses pergantian kepemimpinan rejim Korea Utara berjalan mulus. Prediksi bahwa proses pergantian akan melemahkan rejim Korea Utara tidak terjadi. Kim Jong Il naik tahta menggantikan posisi mendiang ayahnya menjadi pemimpin Korea Utara. Korea Utara dibawah rejim baru Kim Jong Il tidak tertarik untuk melakukan dialog dengan Korea Selatan. Pada saat itu Presiden Korea Selatan, Kim Yong Sam, dianggap sebagai boneka Amerika Serikat, sehingga Korea Utara enggan untuk berdialog dengan Korea Selatan.¹⁰⁴

2.4.3 Kebijakan *Sunshine Policy* Presiden Kim Dae Jung (1998-2001)

¹⁰⁰ *Loccit*, Mel Gurtov, hal 26-27.

¹⁰¹ Keun-Sik Kim, Inter-Korean relations and The Future of the Sunshine Policy, *The Journal of East Asian Affairs*, Vol. XVI, No. 1 Spring/Summer 2002, (The Research Institute for International Affairs, Seoul, Korea 2002), hal 105.

¹⁰² *Loccit*, Don Oberdorfer, hal 338.

¹⁰³ *Opcit*, Keun-Sik Kim, hal 100.

¹⁰⁴ Oknim Chung, The Sunshine Policy, *Korea and World Affairs*, Vol 24, No.1, Spring 2000, (Research Center for Peace and Unification of Korea, 2000), hal 10.

Pada saat Korea Utara dibawah Presiden Kim Dae Jung, merupakan saat dimana kebijakan untuk bersahabat dan berdialog dengan Korea Utara dilaksanakan dengan cara paradigma baru. Pada hari pelantikannya, Kim Dae Jung mengatakan bahwa kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara didasarkan atas tiga prinsip;¹⁰⁵

- Tidak ada toleransi terhadap provokasi yang dilakukan oleh Korea Utara. Maksudnya adalah Korea Selatan tidak akan terpengaruh dan menanggapi jika Korea Utara mulai mengancam akan menggunakan kekuatan militernya.
- Tidak ada pandangan yang merendahkan rejim di Korea Utara.
- Korea Selatan ingin membangun hubungan yang lebih baik dengan Korea Utara dengan rasa hormat.

Presiden Kim Dae Jung pada masa jabatannya mengeluarkan kebijakan *Sunshine Policy* (*engagement policy*). Kebijakan *Sunshine Policy* merupakan cara pandang baru Korea Selatan terhadap Korea Utara. Korea Selatan dibawah Kim Dae Jung berusaha memahami kegelisahan rejim Korea Utara yang isolasionis. Kim Dae Jung menilai bahwa *sunshine* atau cahaya matahari yang hangat akan lebih efektif bila diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan dengan Korea Utara, jika dibandingkan dengan menghembuskan angin dingin terhadap Korea Utara.¹⁰⁶

Kebijakan *sunshine policy* berusaha untuk menciptakan paradigma baru hubungan antara kedua negara Korea yang didasari oleh rasa saling menghargai yang akan memberikan pengaruh kepada masa depan rakyat Korea secara keseluruhan dan menciptakan kerjasama diantara keduanya. Ide utama dari *Sunshine Policy* adalah perdamaian, rekonsiliasi dan kerjasama.¹⁰⁷ Upaya untuk menjalankan kebijakan tersebut direalisasikan dengan melakukan kerjasama diantara kedua negara Korea melalui upaya rekonsiliasi dengan mengesampingkan urusan politik-militer (yang selama ini menjadi penghalang bagi hubungan Korea Utara dan Korea Selatan) dan diharapkan mampu menghadirkan kedamaian yang bertahan lama.¹⁰⁸ Kebijakan ini menarik para penanam modal dari Korea Selatan mau menanamkan modalnya di Korea Utara tanpa dirintangi oleh peraturan pemerintah dan masalah politik.¹⁰⁹

¹⁰⁵ Uk Heo and Chong-Min Hyun, An Analysis of South Korea's Policy Toward North Korea, *Pacific Focus; Inha Journal of International Studies*, Spring 2001, Vol XVI, No.1, (Center for International Studies, 2004), hal 94.

¹⁰⁶ Hong Nack Kim, The Kim Dae-Jung Government's North Korea Policy Problems and Prospects, *Korea and World Affairs*, Vol XXIII, No. 3, Fall 1999 (Korea; Research Center for Peace and Unification of Korea, 1999), hal 9.

¹⁰⁷ *Loccit*, Keun-Sik Kim, hal 98.

¹⁰⁸ *Ibid*, hal 99.

¹⁰⁹ *Loccit*, Okmin Chung, hal 12.

Prinsip hubungan ekonomi diantara Korea Utara-Korea Selatan tidak lagi dihalangi oleh permasalahan politik dan militer, bahkan dukungan kerjasama ekonomi akan terus dilaksanakan jika hubungan kedua negara sedang dalam keadaan memanas.¹¹⁰ Prinsip tersebut yang membuat hubungan ekonomi Korea Utara dan Korea Selatan berjalan baik walaupun sempat terjadi berapa kejadian seperti uji coba rudal Taepodong dan kasus kapal selam milik Korea Utara pada tahun 1998. Perbedaan prinsip ini yang membuat kebijakan pada masa Kim Dae Jung terlihat revolusioner, sangat berbeda jika dibandingkan dengan kebijakan pada masa pemerintahan sebelumnya, yang masih menempatkan isu politik dan militer sebagai faktor determinan dalam hubungan kedua negara Korea.

Tiga ide utama *Sunshine Policy* (perdamaian, rekonsiliasi dan kerjasama) lebih lanjut dijabarkan melalui enam langkah kebijakan;¹¹¹

- Bersama (Korea Utara-Korea Selatan) mengusahakan keamanan nasional melalui rekonsiliasi dan kerjasama.
- Hidup damai bertetangga dan terjalin pertukaran antara Korea Utara dan Korea Selatan.
- Menciptakan situasi yang kondusif bagi perubahan di Korea Utara.
- Menciptakan kondisi yang saling menguntungkan.
- Meraih dukungan dari dunia internasional untuk berjalannya *Sunshine Policy*.
- Mencari kesepakatan bersama di domestik Korea Selatan, terkait kebijakan yang dikeluarkan kepada Korea Utara.

Kebijakan *sunshine policy* inilah yang membawa dialog Korea Selatan dan Korea Utara dilakukan secara intensif. Peristiwa bersejarah terjadi ketika diadakannya *North-South Joint Declaration* pada tanggal 15 Juni 2000. Didalam pertemuan ini Korea Utara dan Korea Selatan sepakat untuk melakukan kerjasama diberbagai bidang dan keduanya akan melakukan dialog untuk mengimplementasikan kesepakatan ini.¹¹² Pasca pertemuan puncak tersebut, kedua negara Korea berusaha untuk tetap menjaga momentumnya dengan melakukan serangkaian kontak melalui pertemuan tingkat menteri dan reuni bagi keluarga yang terpisah.¹¹³

Hasil positif yang diperoleh melalui perjanjian pada tahun 2000 adalah semakin tingginya frekuensi komunikasi diantara kedua negara Korea pada tingkat pemerintah. Tercatat telah

¹¹⁰ *Loccit*, Keun-Sik Kim, hal 99.

¹¹¹ *Ibid*, hal 101-102.

¹¹² *Loccit*, Hong Nak Kim, hal 9.

¹¹³ *Loccit*, Keun-Sik Kim, hal 101.

dilakukan komunikasi melalui dialog tingkat menteri, pertemuan menteri pertahanan dan pertemuan komite kerjasama ekonomi.¹¹⁴ Komunikasi tingkat menteri pun dilakukan pada sektor-sektor strategis yaitu pertahanan dan ekonomi. Fakta tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa intensifitas komunikasi pada masa Presiden Kim Dae Jung lebih tinggi dibandingkan masa-masa presiden sebelumnya. Satu hal yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan untuk merangkul Korea Utara adalah dengan melakukan pertukaran kunjungan bagi para keluarga yang terpisah sebagai akibat terbaginya dua negara Korea. Sentimen persaudaraan sebagai satu bangsa Korea inilah yang disentuh dan dimanfaatkan agar proses pembangunan rasa saling kepercayaan bisa berjalan dengan lancar. Tercatat sejak tahun 1998 hingga 2001, rata-rata 6.000 rakyat Korea Selatan mengunjungi Korea Utara setiap tahunnya.¹¹⁵

Perjanjian tahun 2000 memberikan landasan bagi dilakukannya konstruksi kembali hubungan perekonomian diantara kedua negara. Dalam hal perekonomian tujuan yang ingin diraih adalah adanya saling ketergantungan ekonomi diantara kedua negara Korea. Upaya untuk menuju cita-cita tersebut adalah dengan membangun infrastruktur yang menghubungkan kedua negara, yaitu dengan jalur kereta api dari Seoul-Shinuiju dan dilakukan pembangunan taman industri Gaesong.¹¹⁶ Hubungan perdagangan diantara kedua negara Korea pun mengalami peningkatan drastis, pada tahun 2001 pernah tercatat nilai perdagangan diantara kedua negara mencapai angka US\$ 425 juta.¹¹⁷

Dengan segala prestasi yang diraih dalam pelaksanaan kebijakan *Sunshine Policy*, banyak pihak yang menilai bahwa kebijakan tersebut merupakan kekuatan yang mampu menstabilkan kondisi keamanan di Semenanjung Korea. Kestabilan dalam hubungan politik dan militer diantara Korea Utara dan Korea memberikan angin positif bagi arus investasi dari Selatan menuju Utara. Nilai positif tersebut diberikan juga oleh Amerika Serikat, Jepang, Cina dan Rusia. Kebijakan Presiden Kim Dae Jung dilihat mampu memberikan kestabilan bagi kondisi di kawasan. Prestasi tersebut yang menghasilkan hadiah nobel perdamaian bagi Presiden Kim Dae Jung.

Kemajuan dalam hal dialog kedua negara Korea mendapatkan tantangan ketika pada tahun 2001, muncul isu terorisme internasional dan rejim Korea Utara dilabelkan oleh

¹¹⁴ *Ibid.*, hal 104.

¹¹⁵ *Ibid.*, hal 105.

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.*

pemerintahan Amerika Serikat di bawah George W Bush sebagai negara anggota “poros setan” (*Axis of Evil States*) dan Korea Utara dimasukkan sebagai salah satu negara yang dimungkinkan sebagai sasaran penyerangan oleh Amerika Serikat didalam dokumen *Nuclear Posture Review*.¹¹⁸ Pada 12 Oktober 2001, Korea Utara dengan tiba-tiba memprotes langkah Korea Selatan dalam merespon isu terorisme yang berkembang. Protes tersebut berlanjut kepada pembatalan pertukaran kunjungan keluarga diantara kedua negara Korea pada bulan Oktober.¹¹⁹ Pertemuan tingkat menteri ke-6 (9-14 November 2001), yang dilakukan di Pegunungan Kungang, Korea Selatan menekankan pentingnya rasa persaudaraan diantara kedua negara Korea untuk meningkatkan keuntungan diantara kedua negara melalui upaya dialog dan kerjasama.¹²⁰ Namun usaha dari delegasi Korea Selatan mendapatkan respon negatif dengan adanya penolakan dari delegasi Korea Utara dan menyatakan bahwa dialog kedua negara mengalami kebuntuan.¹²¹

2.4.4 Kebijakan *Policy for Peace and Prosperity* Presiden Roh Moo-hyun (2003).

Tahun 2003 kembali pecah krisis nuklir di Semenanjung Korea.¹²² Pada tahun 2003 Presiden Korea Selatan yang sedang menjabat adalah Roh Moo-hyun. Posisi Presiden Roh Moo-hyun tidak dalam kondisi yang menguntungkan. Tantangan utama pemerintahan Roh Moo-hyun adalah menghadapi krisis nuklir di Semenanjung Korea. Upaya dialog Korea Selatan-Korea Utara pada masa Roh Moo-hyun dijalankan melalui pendekatan *policy for peace and prosperity*.¹²³ Melalui kebijakan tersebut Roh Moo-hyun menempatkan prioritas kebijakannya dengan menjaga stabilitas di Semenanjung Korea. Fokus dari kebijakan tersebut adalah untuk mencari jalan keluar dari krisis nuklir yang terjadi di Semenanjung Korea dan merupakan upaya reunifikasi antara kedua negara Korea.¹²⁴

Walaupun pada tahun 2003 terjadi krisis nuklir di Semenanjung Korea, namun bisa dikatakan hubungan kedua negara cukup stabil. Kondisi ini disebabkan karena permasalahan tahun 2003 tidak melibatkan Korea Selatan secara langsung sebagai negara penyebab terjadinya

¹¹⁸ Peter Van Ness, *The North Korean Nuclear Crisis; Four-Plus-Two-An Idea Whose Time Has Come*, hal 2.

¹¹⁹ James T. Laney and Jason T. Shaplen, *How to Deal with North Korea*, *Foreign Affairs*, Vol. 82, No. 2 (Mar. - Apr., 2003), hal 28.

¹²⁰ *Ibid*, James T. Laney, et.al., hal 25.

¹²¹ *Ibid*, hal 28.

¹²² Untuk kronologis dan krisis nuklir tahun 2003, bisa dilihat pada hal 69.

¹²³ Hyoeng Jung Park, *First Year of the Roh Moo-Hyun Administration*, *Korea and World Affairs*, Vol XXXIV, No. 4, winter 2003, (Korea: Research Center for Peace and Unification of Korea 2003), hal 9.

¹²⁴ *Ibid*, hal 9.

krisis tersebut. Pemicu krisis nuklir tahun 2003 disebabkan oleh sikap tidak konsisten Korea Utara terhadap kesepakatan *Agreed Framework* tahun 1994 dan memanasnya hubungan antara Korea Utara dengan Amerika Serikat.

Kebijakan *peace and prosperity* ditujukan untuk memperluas ruang lingkup dan isi dari *reconciliation and cooperation policy* terhadap Korea Utara yang telah di promosikan pada masa Kim Dae Jung sebelumnya.¹²⁵ Kebijakan *reconciliation and cooperation policy* didasarkan kepada empat prinsip dasar;¹²⁶

- Semua isu dan permasalahan yang menyangkut kedua negara Korea harus diselesaikan dan mencapai kesepakatan melalui jalan dialog.
- Prioritas hubungan kedua negara didasarkan kepada timbal balik rasa percaya yang saling menguntungkan.
- Isu dan masalah antar negara Korea harus diselesaikan oleh Korea Selatan dan Korea Utara sendiri dengan melakukan konsultasi terhadap komunitas internasional.
- Korea Selatan berusaha untuk meyakinkan adanya kejelasan dari kebijakan dalam negeri dan luar negeri dari Korea Utara. Prinsip keempat ini menunjukkan keseriusan dari Korea Selatan untuk mengetahui isu-isu domestik Korea Utara yang memungkinkan akan menghambat proses dialog diantara kedua negara.
- Korea Selatan melakukan usaha untuk menyelaraskan langkah antara Korea Utara dengan Korea Selatan didalam bidang ekonomi dan militer yang didasari dengan membangun kepercayaan diantara kedua negara.

Kebijakan *peace and prosperity* yang dikeluarkan oleh Roh Moo-Hyun terdiri dari tiga tahapan;¹²⁷

- Tahap pertama, Korea Selatan melakukan usaha untuk menyelesaikan isu nuklir dan memfasilitasi terciptanya damai di Semenanjung Korea.
- Tahap kedua, Korea Selatan berusaha untuk melakukan pembangunan hubungan kerjasama ekonomi antara negara Korea dan meletakkan dasar bagi dibentuknya sebuah rejim damai (*peace regime*).

¹²⁵ *Loccit*, Keun-Sik Kim, hal 10-11.

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Loccit*, James T. Laney, et.al, hal 19.

- Tahap ketiga, merupakan tahap terakhir dimana akan berujung kepada dibentuknya kesepakatan damai (*peace treaty*) dan terbentuk sebuah rejim damai (*peace regime*) yang permanen di Semenanjung Korea. Tujuan utama dari tahapan-tahapan kebijakan ini adalah untuk mencapai sebuah rejim damai di Semenanjung Korea.

2.5 Kronologis Krisis Nuklir tahun 2003

Implementasi *Agreed Framework* sejak tahun 1994 mengalami kemunduran sejak tahun 2002. Hal ini terjadi seiring dengan memburuknya hubungan diantara Korea Utara dan Amerika Serikat, serta permasalahan-permasalahan lain terkait dengan program nuklir Korea Utara. Implikasi dari kemunduran pelaksanaan kesepakatan ini membawa akibat kepada kembali pecahnya krisis nuklir di Semenanjung Korea untuk yang kedua kali pada tahun 2003. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya krisis nuklir tahun 2003;¹²⁸

Pertama, Hubungan antara Korea Utara dengan Amerika Serikat yang bersengketa tentang permasalahan nuklir. Terganggunya hubungan antara Korea Utara dengan Amerika Serikat dimulai ketika pada tanggal 6 Oktober 2002 kementerian luar negeri Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan bahwa Korea Utara memiliki program rahasia pengayaan uranium untuk digunakan sebagai senjata nuklir.¹²⁹ Pernyataan ini ditindaklanjuti dengan dilakukannya pertemuan antara deputi Perdana Menteri Luar Negeri Korea Utara, Kang Suk Joo, dengan asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Asia Timur dan Pasifik, James A. Kelly, di Pyongyang pada tanggal 3-5 Oktober 2002. Dalam kunjungannya, James A. Kelly menginformasikan kepada pemerintah Korea Utara bahwa Amerika Serikat telah mengetahui tentang program rahasia pengayaan uranium Korea Utara. Menurutnya program rahasia Korea Utara merupakan pelanggaran dari semangat perjanjian *Agreed Framework* yang disetujui oleh Korea Utara dan Amerika Serikat pada tahun 1994.¹³⁰

Berdasarkan perjanjian *Agreed Framework* tahun 1994, Korea Utara seharusnya membekukan program nuklirnya dan sebagai kompensasi atas tindakan Korea Utara, maka Amerika Serikat mengirim 500 ribu ton BBM ke Korea Utara sebagai pengganti energi nuklir yang dibekukan.¹³¹ Pernyataan asisten Menlu Amerika Serikat dijawab oleh utusan Korea Utara

¹²⁸ Faustinus Andrea, Krisis Semenanjung Korea, Koran Tempo, Selasa 25 Maret 2003.

¹²⁹ SIPRI Year Book 2003, *Armaments, Disarmament and International Security*, (United States: Oxford University Press, 2003), hal 584.

¹³⁰ Doug Bandow, *Wrong War, Wrong Place, Wrong Time; why military action should not be used to resolve the Korean nuclear crisis*, dalam Foreign Policy Briefing, No. 76, May 12, 2003 (CATO Institute, 2003), hal 2.

¹³¹ *Opcit*, Faustinus Andrea.

dengan mengatakan bahwa Korea Utara akan menghentikan program pengayaan uraniumnya dengan syarat bahwa Amerika Serikat berjanji tidak akan menyerang Korea Utara dan berkomitmen untuk melakukan normalisasi hubungan kedua negara. Kang Suk Joo juga menambahkan bahwa Korea Utara berhak melakukan pengembangan senjata nuklir.¹³² Munculnya permasalahan program rahasia yang dilakukan oleh Korea Utara menimbulkan reaksi dari KEDO. Berdasarkan kesepakatan bersama Dewan Eksekutif KEDO (Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat) mengeluarkan keputusan bahwa pengiriman minyak ke Korea Utara akan ditundak sejak bulan Desember 2002.¹³³

Kedua, Munculnya insiden pengecatan kapal Sonsan milik Korea Utara oleh angkatan laut Spanyol yang mengangkut paket rudal scud ke Yaman pada Desember 2002. Isu nuklir Korea Utara semakin memanas ketika terjadi insiden pengecatan terhadap kapal Sonsan milik Korea Utara oleh angkatan laut Spanyol ketika melakukan pengiriman rudal scud ke Yaman. Pengiriman rudal scud dari Korea Utara ke Yaman merupakan fakta bahwa Korea Utara melakukan ekspor baik rudal balistik maupun teknologi pengembangan rudal terutama ke negara-negara di Timur Tengah. Korea Utara telah melakukan ekspor rudal, komponen rudal dan teknologi rudal ke Mesir, Iran, Libya, Pakistan, Suriah dan Yaman.¹³⁴

Ketiga, Korea Utara menyatakan keluarnya negara tersebut dari kesepakatan NPT pada Januari 2003. Paska kunjungan asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan keputusan KEDO untuk menghentikan pengiriman minyak ke Korea Utara, Korea Utara merespon dengan tindakan yang tidak terduga. Korea Utara menanggapi situasi tersebut dengan mengumumkan bahwa Korea Utara akan mengaktifkan kembali program nuklirnya yang dibekukan pada tahun 1994.¹³⁵ Pada tanggal 12 Desember 2002, Direktur Jendral Departemen Energi Atom Korea Utara, Re Ji Son, mengirimkan surat kepada Direktur Jendral IAEA, Mohammed El Baradi, yang berisi informasi bahwa Korea Utara memutuskan untuk mengaktifkan dan menormalisasi kembali fasilitas nuklir miliknya yang sempat di bekukan.¹³⁶

Pada Desember 2002, Korea Utara mulai mengaktifkan kembali kompleks fasilitas nuklir Yongbyon. Pada 22 Desember 2002, IAEA melaporkan bahwa Korea Utara melakukan

¹³² *Opcit*, SIPRI Year Book 2003, hal 584.

¹³³ *Loccit*, SIPRI Year Book 2003, hal 585.

¹³⁴ Missile Overview, diakses dari http://www.nti.org/e_research/profiles/NK/Index_1667.html, diakses 28 Maret 2009, pukul 21.18 WIB

¹³⁵ *loccit*, Barnaby, et.al, hal 17.

¹³⁶ *Opcit* SIPRI Year Book 2003, hal 585.

pembukaan kembali atas fasilitas nuklir, membuka segel dan kamera pengawas yang dipasang oleh IAEA. Tanggal 23-24 Desember 2002, Korea Utara memindahkan semua peralatan monitoring di kompleks fasilitas Yongbyon. Tanggal 27 Desember 2002, Korea Utara memberitahukan kepada IAEA melalui surat untuk menarik tim pengawasnya dari Korea Utara.¹³⁷ Berdasarkan keterangan Kementerian Luar Negeri Korea Utara, pengaktifan kembali fasilitas nuklir adalah demi pemenuhan kebutuhan listrik setelah pengiriman minyak mentah untuk kepentingan listrik dihentikan. Puncak dari krisis nuklir kedua di Semenanjung Korea adalah ketika Korea Utara mengumumkan penarikan dirinya dari NPT pada tanggal 10 Januari 2003.¹³⁸



¹³⁷ *Loccit*, SIPRI Year Book 2003, hal 587.

¹³⁸ *Loccit*, Doug Bandouw, hal 2.